

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM BAGI HASIL
TANAMAN CABAI
(Studi Dusun 8 Desa Sendang Ayu Kec. Padang Ratu Kab. Lampung
Tengah)**



Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh :

**DIAN SETIYAWAN
NPM. 1521030010**

Program Studi : Mu'amalah

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440 H/ 2019 M**

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM BAGI HASIL TANAMAN CABAI

**(Studi Dusun 8 Desa Sendang Ayu Kec. Padang Ratu
Kab. Lampung Tengah)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

DIAN SETIYAWAN

NPM: 1521030345

Program Studi: Mu'amalah

Pembimbing I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si

Pembimbing II : Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440 H / 2019 M**

ABSTRAK

Kerjasama bagi hasil merupakan kerjasama antara kedua belah pihak yang saling tolong-menolong guna membantu perekonomian salah satu pihak. Praktek yang ada dilapangan akad muzara'ah sudah menjadi kebiasaan setiap tahunnya, yang dilakukan si penggarap dengan si pengepul (bos), yang setiap panen cabai semua akan disetorkan kepada pengepul. Menurut hukum Islam praktek muzara'ah itu di perbolehkan adanya saling tolong-menolong, yang tidak sesuai disini adalah tidak ada keterbukaan harga si pengepul (bos) pada saat transaksi pada saat penggarap menyetorkan hasil cabai.

Masalah dalam penelitian ini adalah *pertama*, bagaimana praktek bagi hasil tanaman cabai di Desa Sendang Ayu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah. *Kedua*, bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktek bagi hasil tanaman cabai. Tujuan penelitian untuk mengetahui praktek bagi hasil tanaman cabai dan untuk mengetahui cara pembagian keuntungan antara kedua belah pihak.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Rasearch*) yaitu suatu penelitian yang bersumber dari lapangan (lokasi penelitian) yaitu Desa Sendang Ayu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat sebagai responden yang berkaitan dengan pokok pembahasan dan juga melalui observasi terhadap gejala yang dilapangan, adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara wawancara atau interview dengan responden untuk menanyakan perihal responden, fakta-fakta dan pendapat mereka tentang praktek kemitraan bagi hasil tanaman cabai dan dokumentasi dengan cara observasi kelokasi penelitian. Adapun dalam menganalisis data menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deduktif.

Hasil penelitian ini yaitu, antara penggarap dengan antara pengepul (bos) harus ada keterbukaan dan sistem cara pengelolaan dari segi hal penjialan atau pemberi harga pada saat transaksi saat itu juga biyar tidak ada saling dirugikan. Kerjasama bagi hasil itu diperbolehkan adanya saling tolong menolong antara individu yang satu dengan individu yang lain. yang tidak sesuai menurut hukum Islam karena tidak adanya kepastian harga pada saat transaksi.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi
sebagaimana mestinya terhadap skripsi saudara :

Nama : Dian Setiyawan
NPM : 1521030345
Jurusan : Mu'amalah
Fakultas : Syari'ah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil
Tanaman Cabai (Studi Dusun 8 Desa Sendang Ayu
Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung
Tengah)

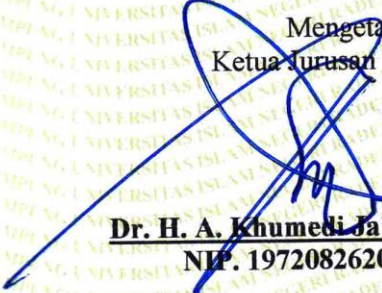
MENYETUJUI

Untuk di munaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II


Yufi Wivos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I
NIP. 197304142000032002 NIP. 196901051998031002


Mengetahui,
Ketua Jurusan Muamalah

Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.
NIP. 197208262003121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Tanaman Cabai (Studi Dusun 8 Sendang Ayu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah), di susun oleh Dian Setiyawan, NPM: 1521030345, Jurusan: Mu'amalah, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah pada hari tanggal: Senin, 17 Juni 2019

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Eti Karini, S.H., M.Hum.

(.....)

Sekretaris : Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I.

(.....)

Penguji I : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.

(.....)

Penguji II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si. (.....)

(.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197009011997031002**

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ، وَاتَّقُوا اللَّهَ ،

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: ‘Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

(Q.S Al-Maidah ayat 2)¹



¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), h, 85

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahil'alamin

Puja dan puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya. Sebagai bukti dan hormat serta kasih sayangku yang masih merasa sangat haus akan ilmu pengetahuan, ku persembahkan karya tulis yang sederhana ini kepada:

1. Bapak Piman yang tercinta, Bapak yang menjadi tulang punggung di keluarga, mencari uang untuk membiayai ketiga anak-anaknya. Yang tidak mengenal lelah dan putus asa dan tidak mengenal panas, hujan untuk mencari segenggam uang rupiah.
2. Ibu Lilik Rahyuni yang ku sayangi, yang selalu memberikan dukungan moril, maupun materil, serta mendoakan anaknya setiap waktu. Memberikan motivasi dan selalumenasehati untuk menjadi lebih baik.
3. Kakak Ari Ardiyanto yang menjadi panutan buat adik-adiknya, dan selalu memberikan motivasi arahan sampai akhirnya skripsi ini selesai.
4. Kakak Deni Setiano selaku mamas yang selalu mendampingi, membantu dan mengarahkan dalam kesulitan mengerjakan skripsi ini. Sampai kapanpun tidak bisa di lupkan atas jasa dan membimbing saya dari nol hingga sampai hingga saat ini.
5. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tempatku menimba Ilmu pengetahuan.

RIWAYAT HIDUP

Dian Setiyawan, dilahirkan di Desa Sendang Ayu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah pada Tanggal 08 Desember 1994. Anak kedua dari tiga bersaudara pasangan Bapak Paiman Ibu Lilik Rahyuni, beralamat di Dusun Umbul Gunung, Kampung Sendang Ayu, Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah.

1. Penulis menempuh pendidikan di SD Negri 2 Sendang Ayu pada tahun 2004.
2. Penulis melanjutkan Pendidikan Menengah Pertama di SMPN Satu Atap Satu Padang Ratu pada tahun 2010.
3. Penulis melanjutkan Pendidikan Menengah Atas di SMK MA'arif 1 Kalirejo pada tahun 2012. Selama penulis aktif di kegiatan Olah raga (Voly Ball).
4. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah.

Bandar Lampung, 20 Maret 2019

Dian Setiyawan
NPM 1521030345

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmannirrohim

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya berupa Ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk. Shalawat serta salam kita junjungkan kehadiran Nabi Muhammad SAW, para sahabat-sahabatnya dan pengikutnya yang setia. Sehingga skripsi dengan berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang system Kemitraan Bagi Hasil Tanaman Cabai (Studi Dusun 8 Desa Sendang Ayu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah) dapat menyelesaikan tepat waktu.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Setara satu (SI) Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu Syariah.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa diucapkan terima kasih sedalam-dalamnya.

Secara rinci ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada:

1. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswanya.
2. Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H. dan Khoirudin, M.S.I masing-masing selaku Kajur dan Sekjur Muamalah.
3. Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si dan Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I masing-masing selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan motivasi sehingga skripsi ini selesai.
4. Kepala Desa dan para karyawan Desa Sendang Ayu yang telah membantu dan meluangkan waktu untuk diwawancarai.
5. Sahabat yang tercinta, dalam sedih, senang, pahit, manis dalam urusan tugas kampus. Kita selalu bersama, lutfi Anovan, Nanda Kukuh Wicaksono, Alfen Eka Perdana, Firman, Muhammad Ridho, Rudi Santoso.

6. Rekan-rekan seperjuangan dalam ilmu di Jurusan Muamalah H angkatan Tahun 2015 bernama, Alfen, Ade, Atika, Chintia, Devi S, Devi A, Devi N, Eni, Indah, Endang, Firman, Novia, Okta, Rudi, Shanti, Sintia, Nanda, Jos, Lutfi, Ridho, Aji, Firman, Melani, Nanis, Fajar, Nia, Intan, Onti, Arista, Ayu S, Ayu L, Yeyen, Iril, Zeliana, Lintang.
7. Temen-temen KKN Kelompok 207 Tahun 2018 Desa Gandri Kecamatan Penengahan, yaitu Tiwi, Farudin, Zakia, Anggun, Rahma, Umi, Siti M, Siti R, Winardo, jojo, lisa, Dodo.
8. Temen-temen PPS Kelompok 25 Pengadilan Agama Gunung Sugih Yaitu temen-temen Komprehensif, Iril, Okta, Novia, Endang Alfen, Devi A, Ade, Ayu S, Ayu L, Zeliana, Enila, Yeyen, Onti, Iwan, Mareta.
9. Almamater tercinta Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung tempatku menimba Ilmu pengetahuan.
10. Akhirnya diharapkan betapapun kecilnya skripsi ini, dapat menjadi sumbagan yang cukup berarti dalam pengembangan dan kemajuan Ilmu pengetahuan khususnya ilmu-ilmu di bidang keIslaman.

Bandar Lampung, 20 Maret 2019

Dian Setiyawan
1521030345

DAFTAR ISI

COVER LUAR.....	i
COVER DALAM.....	ii
ABSTRAK	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTARLAMPIRAN.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian	7

BAB II LANDASAN TEORI

A. Prinsip Akad Dalam Islam	
1. Pengertian Akad.....	13
2. Dasar Hukum Akad	16
3. Rukun dan Syarat Akad	16
4. Tujuan Akad	21
5. Macam-Macam Akad	25
6. Prinsip-prinsip Akad	26
7. Berakhirnya Akad	26
8. Hikmah Akad	29
B. Transaksi Bagi Hasil	
1. Pengertian Muzara'ah.....	29
2. Dasar Hukum Muzara'ah	37
3. Rukun dan Syarat Muzara'ah	44
4. Akibat akad Muzara'ah	55
5. Muzara'ah yang dibolehkan	55
6. Bentuk Pengolahan yang dianggap Terlarang oleh para Ahli Fiqih.....	57
7. Zakat Muzara'ah.....	60
8. Berakhirnya Muzara'ah.....	60
9. Hikmah Muzara'ah	62

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

- A. Gambaran Umum lokasi penelitian Desa Sendang Ayu 63
Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah
- B. Pelaksanaan kemitraan di Desa Sendang Ayu 70
Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah
- C. Praktek kemitraan Desa Sendang Ayu Kecamatan 71
Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah

BAB IV ANALISIS

- A. Pelaksanaa Praktek kemitraan Bagi Hasil Tanaman 77
Cabai di Desa Sendang Ayu Kecamatan Padang Ratu
Kabupaten Lampung Tengah.....
- B. Analisis Praktek Kemitraan Bagi Hasil Tanaman Cabai 79
di desa Sendang Ayu Kecamatan Padang Ratu
Kabupaten Lampung Tengah.....

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 84
- B. Saran 85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Kesbankpol Teluk atau Bandar Lampung
2. Surat Kesbankpol Kabupaten Lampung Tengah
3. Blangko Konsultasi Bimbingan Konsultasi Skripsi
4. Data-data Responden atau wawancara:
 - a. Mbah susah
 - b. Mulyadi
 - c. Muyik
 - d. Lilik
 - e. Priyono
 - f. Maryono
 - g. Agus
 - h. Pajiman
 - i. Nugroho
 - j. Yamto



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan judul ini dilakukan untuk menghindari kesalahan pemahaman dalam memahami maksud dari judul. Adapun judulnya adalah “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM KEMITRAAN BAGI HASIL TANAMAN CABAI”. Adapun beberapa istilah – istilah terhadap dalam judul adalah sebagai berikut.

1. Tinjauan adalah hasil peninjauan pandangan, pendapat, (masalah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).²
2. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul, tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan dinyakini mengikat untuk semua yang beragama islam.³
3. Bagi Hasil artinya akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara muzara'ah dibagi menurut kesepakatan yang di tuangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1470

³ Fathurrahman Djami, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 12.

kelalaian si pengelola. Seandainya pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁴

4. Cabai adalah tanaman perdu yang buahnya berbentuk bulat panjang dengan ujung meruncing, apa bila sudah tua yang berwarna kecoklat-kecoklatan atau hijau tua, berisi banyak isi yang pedas rasanya.⁵

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat di jelaskan bahwa maksud judul penelitian ini adalah menganalisis Tinjauan hukum Islam tentang sistem kemitraan bagi hasil tanaman cabai yang terjadi pada lingkungan masyarakat.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan penulis dalam memilih judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM KEMITRAAN BAGI HASIL TANAMAN CABAI adalah sebagai berikut :

1. Alasan Objektif

- a. Bagi hasil tanaman cabai merupakan sebuah pekerjaan yang selalu dilakukan oleh pemilik modal dan pengelola. Namun tidak sedikit masyarakat yang kurang memahami bagaimana bagi hasil yang sesuai menurut Agama Islam.
- b. Permasalahan ini sangat menarik untuk di teliti karena agar salah satu pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

⁴ Antonio, Muhammad Syafi’I, *Bank Syariah Dari Teori Kepraktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h, 95.

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h, 231.

2. Alasan Subjektif

- a. Pokok pembahasan judul ini berkaitan erat dengan disiplin ilmu di fakultas Syari'ah jurusan Muamalah sehingga sesuai dengan ilmu yang penulis tekuni saat ini.
- b. Tersedia literatur yang menunjang untuk membahas masalah yang penulis teliti, maka sangat memungkinkan untuk dilakukan penelitian.

C. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa melakukan sesuatu kegiatan apapun atau kegiatan perekonomian dan perniagaan tanpa bantuan dan dukungan dari orang lain, dengan kata lain melakukan suatu kegiatan usaha seseorang akan membutuhkan orang lain atau seorang yang ahli agar usaha yang dikelola berjalan sesuai yang diharapkan.

Dalam kehidupan masyarakat banyak sekali masalah-masalah yang menikanmbul antara orang satu dengan orang yang lain dalam melakukan suatu perikatan sebuah manfaat bagi orang yang melakukan suatu pekerjaan tersebut, dan bagi hasil yang harus di utamakan dalam sebuah kegiatan tersebut. Bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik dan seorang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam undang-undang disebut penggarap berdasarkan perjanjian mana

penggarap di perkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha.⁶

Dalam perjanjian disebut “akad” kata akad berasal dari kata *al-aqd*, yang berarti mengikat, menyambungkan atau menghubungkan (*ar-rab*). Banyak orang yang memiliki kemampuan dan keahlian berusaha secara produktif, tetapi tidak memiliki atau kekurangan modal usaha.⁷

Bagi orang yang memiliki modal, akan tetapi tidak memiliki skil dalam menjalankan roda perusahaan atau ada juga orang yang mempunyai modal dan mempunyai keahlian, akan tetapi tidak semua mempunyai waktu dan sebaliknya. Ada juga mereka yang tidak dapat memproduktifkan hartanya, Islam mengejurkan untuk memberikan modal (dana) kepada yang membutuhkan modal demi kelancaran usaha mereka.

Muzara'ah artinya suatu usaha ataupun kerjasama untuk mengerjakan tanah, baik sawah maupun ladang dengan perjanjian yang telah disepakati bersama antara pemilik tanah dan penggarap tanah bahwa biaya (modal) penggarap tanah ditanggung oleh pemilik tanah sebagian hasilnya dibagi menurut ketentuan yang telah disepakati bersama serta bibit yang ditanam berasal dari penggarap tanah.⁸ Kerjasama dalam lahan pertanian adalah suatu bentuk *syirkah*. Dimana satu pihak menyediakan lahan pertanian dan pihak lain sebagai penggarap tanah berdasarkan prinsip bagi hasil.

⁶Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*,(Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h, 61.

⁷ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1997), h, 12.

⁸A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h, 160.

Menurut bahasa *Al-Muzara'ah* memiliki dua arti, yang pertama *al-muzara'ah* yang artinya melemparkan tanaman (modal). Makna yang pertama adalah makna *majas* dan makna yang kedua ialah *hakiki*.⁹

Secara etimologi, *Al-muzara'ah* berarti kerjasama di bidang pertanian antara pemilik tanah dengan petani penggarap.¹⁰

Pendapat Imam Syafi'i akad muzara'ah boleh dilakukan apabila akad itu mengikut kepada musaqah. Akad muzara'ah mengikut kepada musaqah dengan ketentuan tidak ada pemisahan antara kedua akad ini.

Disinilah ada kecurangan yang mengakibatkan salah satu pihak di rugikan.

Pada Surat Al-Muthaffifin : 83



Artinya :1. Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang). 2. (yaitu) orang-orang apabila menerima takaran dari orang lain mereka meminta dicukupi. 3. Dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi.¹¹

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), h, 153.

¹⁰ Nasrun Haroen, *fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 275

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), h, 470

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرِعْهَا أَوْ لِيَمِّنْ

حَتَّى أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ

“Dari Abu Hurairah r.a., berkatanya: Rasulullah SAW bersabda: “ Siapa yang mempunyai tanah, hendaklah tanah itu ditanamnya atau berikan kepada saudaranya. Hendaklah ia tidak suka memberikannya orang lain, maka hendaklah tanah itu tetap dimilikinya”.¹²

Masyarakat di Desa Sendang Ayu Kecamatan Padanag Ratu Kabupaten Lampung Tengah mayoritas penghasilannya sebagian besar dari petanian, gunung, ladang dan peternakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karena masyarakat mayoritas petanian, sekarang petani bukan sekedar bertani saja melainkan bertanaman cabai untuk menabuh ekonomi. Petani biasaya akan menam cabai yang ada tanah yang kosong atau menyewa sebidang tanah yang akan di tanam tanaman cabai. Masyarakat yang di gunakan bagi hasil ini yang disebut dengan *kemitraan*. Kemitraan disini adalah bagi hasil yang dilakukan pengusaha kedua belah pihak antara pemilik modal dengan si penggarap. Kemitraan yang dilakukan dimasyarakat si pengelola modal akan meberikan semua kebutuhan yang di perlukan kepada pengelola, seperti pupuk, obat, bibit, mulsa dan lain-lainnya. Dari pihak pengelola hanya sekedar ngelola dari awal sampai akhir tanpa campur tangan si pemodal. Pada saat panen cabai si pengelola akan menyetorkan kepada pengepul atau

¹² Shahih Bukhari, *Terjemahan Hadist*, (Jakarta: PT. Bumirestu, 1992), h, 11.

bos . Pada saat saat menimbang si pengelola hanya mencatat berapa banyak atau berapa kilo yang di dapatkan. Pemberi modal tidak memberikan harga secara langsung, melainkan harga yang akan diketahui setelah penyetoran selanjutnya atau pada panen berikutnya, disini lah ada kecurangan yang tidak di ketahui kepada si pengelola.

Keuntungan yang diperoleh pada petani saat panen itu belum di ketahui karena petani mengambil seluruhnya seperti pupuk, obat, bibit, mulsa dan lain-lain, yang kuintasi dipegang si pemodal, semua keseluruhan yang akan di jumlahkan dan berapa mendapat keuntungan atau ruginya. Pengelola modal sudah mendapatkan keuntungannya dari potong 2.000 cabai perkilo. Pada saat masyarakat mengalami kerugian, masyarakat tidak ngembalikan uang secara tunai, melainkan jangka panjang sampai hutangnya lunas.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah ini dapat dirinci sabagai berikut:

1. Bagaimana praktek bagi hasil tanaman cabai di desa Sendang Ayu ?
2. Bagaiman tinjauan hukum Islam tentang praktek bagi hasil tanaman cabai ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sabagai berikut:

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui praktek bagi hasil tanaman cabai di desa Sendang Ayu.
- b. Untuk mengetahui cara pembagian keuntungan antara kedua belah pihak.

2. Kegunaan penelitian

- a. Untuk menambah wawasan penulis dalam mengetahui bagi hasil tanaman cabai dan diharapkan dapat memperkaya khasanah pemikiran keIslaman Jurusan Muamalah pada khususnya.
- b. Peneliti ini berguna untuk menambah referensi dalam pembuatan tulisan-tulisannya yang berhubungan dengan tulisan ini.

F. Metode Penelitian.

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis peneliti

Peneliti ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*), adalah metode peneliti penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi ataupun gambaran. Mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan anatar fenomena yang diselidiki. Sedangkan penelitian kualitatif yaitu bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata, lisan maupun tingkahlaku mereka yang diamati.¹³

¹³ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), h. 205.

b. Sifat meneliti

Peneliti ini bersifat deskriptif yang berarti bersifat menggambarkan ataupun melukiskan suatu hal. Pengertian penelitian deskriptif adalah peniliti yang menggambarkan peristiwa yang terjadi dilapangan apa adanya dalam hal ini tentang tinjauan hukum Islam tentang sistem kemitraan bagi hasil tanaman cabai.

2. Sumber data

Sumber data adalah tempat darimana data itu diperoleh.¹⁴ Adapun sumber data dalam peneliti ini terdiri dari sumber data sekunder yaitu kesaksian atau sumber data yang tidak berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli.¹⁵ Sumber data sekunder yang penulis gunakan ada dua yakni :

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengembalian data langsung pada responden sebagian sumber informasi yang dicari.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak-pihak lain, tidak dari subjek penelitiannya. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan peneliti. Sumber data yang

¹⁴ Suharsismi Arikunto, *Prosedur peneliti Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1998), h. 114.

¹⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Peneliti Hukum*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004), h. 115-116.

diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal, serta bahan lainnya yang terkait dengan peneliti yang akan dilakukan.

3. Populasi dan sampel

- a. Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu. Jelas, dan lengkap, objek ataupun nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang perusahaan, lembaga, media dan lainnya.¹⁶ Dalam penelitian ini populasi yang akan diteliti yang terdiri dari 50 orang .
- b. Sampel adalah bagian atau wakil dari populasi yang diteliti. ¹⁷ Dalam penelitian sampel yang digunakan *non random sampling* yaitu tidak semua individu didalam populasi diberi peluang yang sama yang ditugaskan menjadi anggota sampel.¹⁸ Teknik non random sampling yang digunakan adalah jenis *purposive sampling* yakni pengelola tanah dan penggarap. Sebanyak 10 orang, 1 orang yang menjalankan kerjasama kemitraan (bos) dan 9 orang petani.

4. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang dapat digunakan untuk membahas persoalan yang terdapat dalam peneliti ini yaitu berupa.

- a. Observasi

¹⁶ Susiadi As, *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung : Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h.81.

¹⁷ Suharsimin Arikunto, *Op. Cit.*, H. 104

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Etodologi Research I*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1980, h.

Observasi merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data peneliti dengan pengamatan.¹⁹ Observasi yang dilakukan pada peneliti ini adalah dengan mengamati para pihak melakukan bagi hasil yang dilakukan masyarakat di Desa Sendang Ayu.

b. Wawancara (interview)

Wawancara (interview) adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada responden.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya. Plaksana dengan menggunakan catatan baik berupa arsip-arsip aatu dokumentasi, maupun keterangan yang berkaitan dengan bagi hasil tanaman cabai.

5. Metode pengelola data

Pengelola data yaitu melakukan analisis terhadap data dengan metode dan cara-cara yang berlaku dalam peneliti. Pengelola data umumnya dilakukan dengan cara:

- a. Editing data yaitu memeriksa kembali semua data yang di peroleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian sarta relevensinya dengan data lain.

¹⁹ *Ibid*, h, 74.

- b. Sistematisasi data yaitu kegiatan manubulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan di beri tanda dalam bentuk tabel-tabel yang berisi rangka-rangka dan presentase apabila data itu kuantitatif, mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi data dan urusan masalah bila data itu kualitatif penyusunan data memudahkan analisis data.²⁰

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²¹

Terdapat dua metode secara berfikir dalam membahas dan mengadakan analisa data, sebagai berikut. Metode deduktif adalah menetapkan kesimpulan yang bersifat khusus dengan berdasarkan kepada kaidah-kaidah dan fenomena yang bersifat umum. Berkaitan dengan skripsi ini, metode deduktif digunakan pada saat mengumpulkan data secara umum dari berbagai buku-buku Fiqih, Tafsir, Al-Quran dan Hadist, dan bersumber lainnya. Metode induktif adalah menetapkan suatu kesimpulannya yang bersifat umum dengan menggunakan kaidah-kaidah yang bersifat khusus.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif adalah prosedur penelitian yang

²⁰ Abdul Kadir dan muhammad, *Hukum Dan Peneliti Hukum*, (Bandung : Mitra Aditya Bakti, 2004), h, 91.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*(Bandung : Alfabeta, 2016), h,334.

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dari lokasi penelitian.

Penelitian analisis data sudah terkumpul secara keseluruhan, kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode deduktif. Cara berfikir deduktif adalah dengan cara bermula dari kata yang bersifat umum tersebut di tarik kesimpulan yang bersifat khusus.²²



²² Suharsimi Arikunto, *Op, Cit.*, h. 28

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian Akad

Akad merupakan perjanjian yang mengikat hubungan kedua belah pihak itu sekarang dan yang akan datang²³ Pertalian ijab qabul (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada objek perikatan.

Menurut etimologi (bahasa) akad adalah:



Artinya: “Ikatan antara ujung-ujung sesuatu, baik ikatan secara nyata atau maknawi yang berasal dari satu sisi atau dua sisi”.²⁴

Menurut terminologi ulama fiqih, akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus yaitu:

a. Pengertian umum

²³ Rachmawati Nuraini Eka, Abu Mumin bin Ghani. “Akad Penerbit Sukuk di Pasar Modal Indonesia Dalam Perspektif Fiqih”. Vol 14, No 1 (2017): Al-Adalah. ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/2203/2384. 14 Mei 2019

²⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 45

Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat para ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah yaitu :

كُلُّ مَا عَزَمَ الْمَرْءُ عَلَى فِعْلِهِ سَوَاءٌ صَدَرَ بِإِرَادَةٍ مُنْفَرِدَةٍ كَالْوَقْفِ وَالْأَعْبَاءِ وَالطَّلَاقِ

وَالْيَمِينِ أَمْ إِحْتَاجَ إِرَادَتَيْنِ فِي إِثْنَاءِ لَهُ كَالْبَيْعِ وَالْإيجَارِ وَالتَّوَكُّلِ وَالرَّهْنِ

Artinya: “Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentuknya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli perwakilan, dan gadai”.

b. Pengertian khusus

Pengertian dalam arti khusus yang dikemukakan ulama fiqh antara lain:

إِزْتِبَاطُ إِيجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَنْبُتُ أَثَرُهُ فِي مَحَلِّهِ

Artinya: “Perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara yang berdampak pada objeknya.

تَعَلُّقُ كَلَامٍ أَحَدٍ أَلَا قَدْ يَنْبَغِي بِالْآخِرِ شَرْعًا عَلَى وَجْهِ يَظْهَرُ أَثَرُهُ فِي الْمَحَلِّ

Artinya: “Pengaitan ucapan salah seorang yang akad dengan yang lainnya secara syara bagi yang tampak dan berdampak pada objeknya.”²⁵

Terkadang kata akad menurut istilah dipergunakan dalam pengertian umum, yakni sesuatu yang dikaitkan seseorang bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain dengan kata harus. Diantaranya adalah firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Wahai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”.²⁶

Dalam akad pada dasarnya dititik beratkan pada kesepakatan antara dua belah pihak yang ditandai dengan ijab-qabul. Dengan demikian ijab-qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara. Karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasari pada keridhaan dan syariat Islam.²⁷

Sedangkan menurut pasal 262 Mursid al-Hairan, akad merupakan, ‘pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain menimbulkan akibat hukum dari objek akad. Menurut Prof. Dr. Syamsul Anwar akad adalah “pertemuan ijab dan qabul sebagai

²⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 43-44

²⁶ Shalah ash-Shawi & Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 26

²⁷ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 27-28

pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.²⁸

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa *akad* adalah suatu perbuatan pertanyaan dengan menunjukkan sesuatu keridhoan dalam suatu kesepakatan ataupun perjanjian yang diungkapkan melalui *ijab* dan *qabul* diantaranya dua orang ataupun lebih sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara. Bahwa *akad* adalah “pertalian” *ijab* (ungkapan tawaran di situ pihak yang mengadakan kontrak) dengan *qabul* (ungkapan penerimaan oleh pihak-pihak lain) yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak. Oleh karna itu di dalam Islam tidak semua kesepakatan dan perjanjian yang tidak didasarkan pada keridhoan dalam syari’at Islam.

2. Dasar Hukum Akad

a. Surat Al-Maidah Ayat 1 :

أَيُّهَا يَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa akad melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib.²⁹

b. Surat Ali-imran ayat 76

²⁸ M. Ali Hasan , *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (fiqh Muamalah), (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003), h.102-103.

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung :CV Penerbit Dipenegoro, 2006), h. 84.

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya : (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat) nya dan bertaqwa, maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa.³⁰

3. Syarat dan Rukun Akad

a. Syarat Akad

Pendapat Abdul Wahab Khalaf adalah sesuatu yang akan status adanya hukum karena adanya syarat dan ketiadaan syarat berakhir ketiadaan hukum.³¹ Syarat merupakan sesuatu yang ada dalam suatu hukum yang menetapkan hukum tersebut sah ataupun tidaknya, dengan kata lain hal penting yang menentukan keabsahan tentang suatu hukum. Untuk melangsungkan suatu akad yang diperbolehkan menurut hukum Islam, diperlukan suatu syarat yang wajib disempurnakan demi keabsahan akad tersebut. Syarat-syarat terjadi akad terbagi menjadi dua macam,³² yaitu :

- 1). Syarat-syarat yang bersifat umum, adalah syarat-syarat yang wajib di sempurnakan wujudnya dalam berbagai akad.
- 2). Syarat-syarat yang bersifat khusus, adalah syarat-syarat yang berwujudnya wajib ada dalam sebagian akad.

³⁰ *Ibid.*, h.47.

³¹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: CV, Amzah, 1992), h. 118.

³² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h.49.

Sedangkan pendapat Nasroen Harun,³³ bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam berbagai akad yaitu :

a). Pihak-pihak yang melakukan akad itu telah cakap bertindak hukum (*mukallaf*) dan objek akad itu merupakan milik orang yang tidak ataupun belum cakap bertindak hukum maka harus dilakukan oleh walinya. Oleh sebab itu, suatu akad yang dilakukan orang gila dan anak kecil yang belum *Mumayyiz* secara langsung hukumnya tidak sah. Tetapi jika dilakukan oleh wali mereka dan sifat akad yang dilakukan memberikan manfaat bagi orang-orang yang diampuninya maka akad itu hukumnya sah.

b). Objek akad itu diakui oleh syara' untuk objek akad ini disyaratkan pula :

- (1). Berbentuk harta,
- (2). Dimiliki oleh seseorang, dan
- (3). Bernilai harta menurut syara.

Oleh sebab itu jika objek akad itu sesuai yang tidak bernilai harta dalam Islam, maka akadnya tidak sah. Seperti Khamar.

- (4). Akad itu tidak dilarang oleh nas (Al-Quran dan hadist) syara.

³³ Nasroen Harun, *Op. Cit.*, h. 101-104.

(5). Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus yang terkaid untuk kad ini. Adalah, disamping memenuhi syarat-syarat umum yang harus dipenuhi suatu akad, akad itu juga harus memenuhi syarat-syarat khususnya.

(6). Suatu akad bisa bermanfaat.

(7). Pernyataan ijab tetep utuh maupun sah sampai terjadinya qabul. Apa bila ijab tidak sah lagi apabila qabul diucapkannya, maka akad itupun tidak sah.

(8). Ijab maupun qabul dilakukan dalam satu majelis, adalah suatu keadaan untuk menggambarkan terjadinya sesuatu transaksi.

(9). Tujuan akad itu harus dijelaskan yang di akui oleh syara, tujuan akad ini terkaid erat dengan bentuk akad yang dilakukannya.³⁴

4. Rukun Akad

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah ijab dan qabul. Adapu orang yang mengadakan akad atau atau hal-hal lainnya yang menunjukan terjadinya akad tidak dikatagorikan rukun sebab keberadaannya sudah pasti.

Ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun, yaitu:

³⁴ Hendi. *Op.cit.*, h.5152.

- a. Orang yang berakad atau *subjek (aqid)*.
- b. Benda-benda yang akan di akadkan atau *objek akad (maqud alaih)*.
- c. *Maudhu Al-Aqid* adalah tujuan atau maksud yang mengadakan akad.³⁵
- d. *Shighat*, yaitu ijab qabul.

Definisi ijab menurut ulama Hanafiyah adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima, sedangkan qabul adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan ijab, yang menunjukkan keridhaan atas ucapan orang penerima.³⁶

Dua orang atau lebih yang melakukan akad ini adalah dua orang atau lebih yang secara langsung terlibat dalam akad. Kedua belah pihak dipersyaratkan harus memiliki kelayakan untuk melakukan akad sehingga perjanjian ataupun akad tersebut dianggap sah. Kelayakan terwujudnya dengan beberapa hal berikut:

- 1). Kemampuannya membedakan yang baik maupun yang buruk.

Artinya apabila pihak-pihak tersebut sudah berakal lagi baligh atau tidak dalam keadaan tercekal. Orang yang tercekal karena dianggapnya idiot ataupun bangkrut total, tidak sah melakukan perjanjian.

³⁵ Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalat, (Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010), h. 51

³⁶ Rachmat Syafe'i, *Op., Cit*, h. 45

- 2). Bebas memilih. Tidak sah akad yang dilakukan seseorang di bawah paksaan, kalau dipaksaan itu terbukti, contohnya orang yang berhutang dan butuh pengalihan hutangnya, ataupun orang yang bangkrut kalau di paksa untuk menjualka barangnya untuk menutupi hutangnya.

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah rukun akad hanya satu, yaitu *shighah*. Adapun selainnya tidak termasuk bagian dari hakikat akad, sekalipun keberadaannya sudah pasti. Dengan kata lain *shighah* dapat dikatakan termasuk penunjang dalam akad dan merupakan keturunan (derivasi) dari *shighah*. Artinya *shighah* tidak aka nada jika tidak terdapat kedua belah pihak yang berakad (*aqidain*) dan objek akad (*ma'qud 'alaih*).³⁷

Sedangkan menurut Jumhur ulama fiqh rukun adalah sesuatu tergantung sesuatu yang lain atasnya, tetapi tidak harus berada pada esensi sesuatu tersebut.³⁸ Jadi yang dimaksud dengan rukun adalah sesuatu unsure penting yang menyebabkan adanya suatu pekerjaan atas pekerjaan yang lain.

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Rumah misalnya, terbentuknya karena adanya unsure-unsur yang membentuknya, yaitu fondasi,

³⁷Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2016), h. 13

³⁸Nasrun Haroen, *Usul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Publishin House, 1996), h.264.

tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsep hukum Islam, unsure-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.

5. Tujuan akad (*maudhu al-'aqad*)

Dalam KHES dikemukakan pada bagian pertama Bab III buku Kedua tentang Rukun dan Syarat Akad (pasal 22 s/d 25). Keempat pasal yang termaktub dalam bagian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 22 : Rukun akad terdiri atas
 - 1). Pihak-pihak yang Berakad.
 - 2). Objek akad.
 - 3). Tujuan pokok akad.
 - 4). Kesepakatan.
- b. Pasal 23, Pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, ataupun badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.
- c. Pasal 24, objek akad adalah amwal maupun jasa yang dihalalkan orang dibutuhkan oleh masing-masing pihak, untuk pasal 25, akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup untuk mengembangkan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.

Pendapat para ulama Hanafiyyah, berpendirian bahwa rukun akad itu hanya satu adalah *sighat al aqd* (ijab Kabul), sedangkan pendapat mereka pihak-pihak yang berakad dan objek akad tidak termasuk dalam rukun akad, tetapi termasuk dalam syarat akad, karena pendapat mereka yang dikatakan rukun yaitu esensi yang

berada dalam akad itu sendiri, sedangkan pihak-pihak yang berakad dan objek akad berada diluar esensi akad.³⁹

Adapun mengenai rukun akad, ulama fiqh memiliki perbedaan pendapat dalam menentukannya. Menurut Hendi Suhendi,⁴⁰ rukun akad yaitu sebagai berikut :

- 1). Aqid ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri suatu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang.
- 2). Ma'qud 'alaih ialah benda-benda yang diakadkan.
- 3). Maudhu' al-aqad ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan akad pokok akad.
- 4). Sighat al-aqad ialah ijab dan qabul.

Menurut ulama Hanafiyah, sebagai mana dikutip oleh Rachmat Syafe'i, yang berpendirian bahwa rukun akad itu hanya satu yaitu *Sighat al-aqd* (ijab dan qabul), sedangkan pihak-pihak yang berakad dan objek akad, pendapat mereka tidak termasuk syarat-syarat akad, karena menurut mereka yang dikatakan rukun itu adalah esensi yang berada dalam akad itu sendiri sedangkan pihak-pihak yang berakad dalam objek akad berada diluar esensi.⁴¹

³⁹ Nasroen Haroen, *Op. Cit.*, h. 99.

⁴⁰ Hendi suhendi, *Op.Cit.*, h.47.

⁴¹ Racmat Syafe'I, *Op, Cit.*, h. 43.

Menurut Hendi Suhendi,⁴² hal-hal yang harus diperhatikan dalam pernyataan *Sighat al-aqd* (ijab dan qobul) adalah sebagai berikut :

a). *Sighat al-‘aqd* (ijab dan qobul) harus jelas pengertiannya.

Kata-kata dalam *Sighat al-‘aqd* (ijab dan qobul) harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian.

b). Harus sesuaian antara *Sighat al-‘aqd* (ijab dan qobul), tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda *lafadz*. Adanya kesimpangsiuran dalam *Sighat al-‘aqd* (ijab dan qobul) akan menimbulkan persengketaan yang dilarang oleh agama karena bertentangan dengan *ishlah* diantara manusia.

c). Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak diancam atau di takut-takuti oleh orang lain karena dalam tijarah harus saling ridha.

Berdasarkan uraian diatas rukun akad mencakup, orang yang berakad, benda yang diakadkan, tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, ijab dan qobul.

6. Tujuan Akad

Tujuan akad (*maudhul al-‘aqd*) adalah maksud utama disyariatkan akad itu sendiri. Misalnya, seseorang nasabah ingin melakukan jual

⁴² Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h, 47-48.

beli melalui lembaga perbankan syariah tujuannya tentu selain mendapatkan keuntungan secara ekonomi, juga dalam rangka mengamalkan firman Allah (Q.S al-Baqarah (2): 275). Karena dalam firman tersebut ditegaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dengan demikian, jika seseorang hamba Allah yang ingin mendapatkan keuntungan hakiki bukan dilakukan dengan cara riba, melainkan dengan cara jual beli.

Dengan menepatkan tujuan akad secara lahir dan batin pada waktu pemulaan akad, maka diharapkan akan lebih menuntut kesungguhan dari masing-masing pihak yang terlibat sehingga apa yang menjadi tujuan akad dapat tercapai. Dan untuk menjamin tercapainya kemaslahatan serta menghindari kemudharatan, para fuqaha menegaskan bahwa semua perbuatan yang mengandung tujuan tidak masyru' (bertentangan dengan hukum syara), sehingga menimbulkan kemudharatan maka hukumnya haram.⁴³

7. Macam-Macam Akad

Selain itu, akad juga dapat dilihat berdasarkan maksud dan tujuan akad yaitu :

- a. Kepemilikan
- b. Menghilangkan kepemilikan
- c. Kemutlakan, yaitu seseorang mewakilkan secara mutlak kepada wakilnya.

⁴³ Mardani, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 89.

- d. Perikatan, yaitu larangan kepada seseorang untuk beraktifitas seperti orang gila.
- e. Penjagaan.⁴⁴

Selain dilihat segi keabsahan menurut syara', dapat juga dilihat dari segi penamaannyayang menurut para ulama fiqh terbagi menjadi dua macam⁴⁵ yaitu :

1). *Al Uqud Al-musammah* yaitu akad-akad yang ditentukan nama-namanya oleh syara "serta dijelaskan hukum-hukumnya seperti upah mengupah, sewa menyewa, perserikatan, wakalah, hibah dan lain-lainya.

2). *Al'Aqud Ghair Al-musammah*, adalah akad-akad yang penanamaanya dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan keperluan mereka di sepanjang waktu maupun tempat.

Selain itu, akad juga dapat juga dilihat berdasarkan maksud maupun tujuan akad,⁴⁶ yaitu :

- a). Kepemilikan
- b). Menghilngkan kepemilikan
- c). Kemutlakan, yaitu seorang mewakilkan secara mutlak kepada wakilnya

8. Prinsip-Prinsip Akad

⁴⁴Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), h. 67.

⁴⁵ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet Ke-4, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h.93.

⁴⁶ Rahmat Syafe'I, *Op.Cit.*, h.67.

Dalam hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan adalah sebagai berikut :

- a. Prinsip kebebasan berkontrak
- b. Prinsip perjanjian itu mengikat
- c. Prinsip kesepakatan bersama
- d. Prinsip ibadah
- e. Prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi
6. Prinsip kejujuran (amanah)⁴⁷

9. Berakhirnya Akad

Suatu akad dipandang berakhir apa bila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apa bila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Dalam akad gadai dan penganggungan (*kafalah*), akad dipandang telah berakhir apa bila uang telah dibayar.⁴⁸

Akad berakhirnya dengan sebab *fasakh* (kematian). Berikut ini akan diuraikan satu persatu hal-hal menyebabkan akad berikut:

- a. Fasakh dengan sebab akad *fasid* (rusak).

Dengan terjadinya akad *fasid*, seperti *bai' majhul* (jual beli objeknya tidak jelas), ataupun jual beli untuk waktu tertentu, maka jual beli itu wajib *difasakhkan* karena kedua belah pihak ataupun

⁴⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 35.

⁴⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 90-100.

oleh hakim, terkecuali bila terdapat halangan untuk *menfasakhkan*, contoh barang yang dibeli telah dijual atau dihibahkan.

b. Fasakh dengan sebab *khiyar*.

Terdapat orang yang punya hak *khiyar* boleh menfasakhkan akad. Akan tetapi, pada *khiyar aibi* kalau sudah serah terima, pendapat Hanafiyah tidak boleh *menfasakhkan* akad, melainkan atas kerelaan ataupun berdasarkan keputusan hakim.

c. Fasakh dengan *iqalah* (menarik kembali).

Apabila salah satu pihak yang berakad merasa menyesal dikemudian hari, dia boleh menarik kembali akad yang dilakukan berdasarkan keridhaan pihak lain.

d. Fasakh karena tidak ada *tanfiz* (penyerahan barang ataupun harga). contoh pada akad jual beli barang rusak sebelum serah terima maka akad ini menjadi *fasakh*.

e. Fasakh karena *jatuh tempo* (habis waktu akad) ataupun terwujudnya tujuannya akad ini.

Akad fasakh akan berakhir dengan sendirinya karena habisnya waktu akad ataupun telah terwujudnya tujuan akad, contohnya akad ijarah berakhir dengan habisnya waktu sewa.⁴⁹

f. Dalam akad juga dapat berakhir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

⁴⁹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 61

- 1). Berakhir masa berlaku akad itu, apa bila akad itu memiliki tenggang waktu.
- 2). Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu mengikat.
- 3). Dalam suatu akad yang bersifat mengikat, akad dapat berakhir bila :
 - a). Akad itu fasid
 - b). Berlaku khiyar syarat, khiyar aib
 - c). Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak yang berakad
 - d). Rela tercapai tujuan akad itu secara sempurna
 - e). Wafat salah satu pihak yang berakad.⁵⁰

10. Hikmah Akad

Akad dalam muamalah antara sesama manusia tentu mempunyai hikmah, antara hikmah di adakannya akad adalah sebagai berikut:

- a. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memilih sesuatu.
- b. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan sesuatu ikatan perjanjian, karena telah diatur secara syar'i.
- c. Akad merupakan (payung hukum) di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.⁵¹

⁵⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 12.

B. Muzara'ah

1. Pengertian Muzara'ah

Muzara'ah artinya kerjasama pengolahan pertanian dengan pemilik lahan ataupun penggarap, dimana pemilik tanah (lahan) memberikn lahan pertanian kepada si penggarap untuk di tanaminya yang dipelihara dengan imbalan bagi masing-masing (presentase) dari hasil panennya.⁵²

Muzarah artinya kerjasama pengolahan pertanian dengan pemilik lahan ataupun penggarap, dimana si pemilik tanah (lahan) menyerahkan sebidang tanah (lahan) pertanian kepada si penggarap untuk di tanami ataupun di pelihara dengan imbalan tertentu (*nishab*) dari hasil panen yang benihnya berasal dari pemilik tanah.⁵³

Menurut bahasa, *Al-muzara'ah* yang berarti *Tharh al-Zur'ah* (melemparkan tanaman).⁵⁴ *Muzara'ah* memiliki dua arti yang pertama *al-muzara'ah* yang berarti *Tharh al-Zur'ah* (melemparkan tanaman) maksudnya adalah modal (*al-budzar*). Makna yang pertama adalah makna majaz, makna yang kedua adalah *al-inbat* makna hakiki makna kedua ini berarti menumbuhkan.⁵⁵

Muzara'ah (الْمُزَارَعَةُ) adalah *wajan* مُفَاعَلَةٌ dari kata الزَّرَعَ yang sama artinya dengan أَلَاءَ نَبَاتٌ (menumbuhkan). Muzara'ah dinamai pula

⁵¹ Abdul Rahmlan Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 59

⁵² Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 218

⁵³ Muhammad Sholahudin, *Kamus Istilah Ekonomi Keuangan dan Bisnis Syariah*, (Jakarta: Gremedia Pusat Utama, 2011), h. 116

⁵⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 4, (Bandung: PT Alma' Arif, 1996), h. 81

⁵⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT Raja Grofindo Persada, 2013), h. 152

dengan *al-mukhabarah* dan *musaqah*. Maka orang-orang Irak memberikan istilah *muzara'ah* dengan *al-qarah*.⁵⁶

Muzara'ah artinya suatu diperjanjikan antara kedua belah pihak untuk pihak pemodal akan menyerahkannya sebidang tanahnya untuk ditanami kepadanya maupun pihak bersangkutan, dengan cara dibagi hasilnya yang sesuai dengan kesepakatan.⁵⁷

Muzara'ah adalah kerjasama bidang pertanian antara pemilik tanah dengan petani penggarap. Sedangkan terminologi (istilah) menyerahkan tanah kepada seorang penggarap untuk digarap ataupun hasil dibagi dua.⁵⁸

Muzara'ah artinya suatu usaha ataupun kerjasama dengan mengerjakan tanahnya, baik ladang ataupun sawah dengan perjanjian yang telah disepakatinya, diantara yang punya tanah ataupun petani tanah biasanya modal (biayanya) petani tanah di tanggung oleh yang punya tanah ataupun hasil di bagi menurut ketentuan yang telah disepakatinya bersama-sama seperti benih yang di tanam berasal dari pemilik tanah.⁵⁹

Muzara'ah artinya akad transaksi kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian dan bibit kepada si penggarap untuk menanami dan

⁵⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2001), h. 205

⁵⁷ Ahmad Ifham Sholihin, *Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h.

⁵⁸ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 145

⁵⁹ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam*, (Bandar Lampung: Permatenet Publishing, 2016), h. 207

memelihara dengan imbalan pembagian imbalan tertentu (presentase) dari hasil panen.⁶⁰

Menurut Syaikh Ibrahim Al-Bajuri berpendapat *muzra'ah* artinya pekerja pengelola lahan dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik modal.⁶¹

Menurut Imam Ibnul Qayyim berkata: *muzara'ah* ini lebih jauh dari kata kelaziman dan kerugian dari pada *ijarah*. Karena dalam *ijarah*, salah satu pihak sudah pasti mendapatkan hasil. Sedangkan *muzara'ah*, apabila tanaman tersebut membauhkan hasil, maka keduanya mendapatkan untung apa bila tidak mendapatkan hasil buah maka menanggung kerugian bersama.⁶²

Menurut Dharin Nas, Al-Syafi'i mengatakan bahwa *mukhabarah* artinya penggarapan tanah dengan apapun yang dikeluarkannya suatu tanah tersebut. Sedangkan *muzara'ah* artinya seseorang pekerja menyewakan tanahnya dengan apapun yang dihasilkannya suatu tanah tersebut.⁶³

Dari istilah perbankan Syariah *muzara'ah* adalah kerjasama pengolahan pertanian kepada mempunyai tanah (lahan) dengan penggarapan, dalam hal ini mempunyai tanah (lahan) meberikan tanah pertanian kepadanya, seorang petani untuk menanaminya ataupun

240 ⁶⁰ Mardani, *fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h.

⁶¹ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h. 155

⁶² Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari* di Terjemah oleh Abdul Hamyik Al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 480

⁶³ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h. 205

memelihara mendapatkan imbalan, mendapatkan bagian (presentase) dari hasil panennya yang sesuai kesepakatan.⁶⁴

Menurut ulama Hanafiah *muzara'ah* adalah akad antara pemilik tanah dengan petani atas dasar petani menerima upah dari hasil mengerjakan sawah. Atau dengan ungkapan lain, pemilik sawah mengupah petani untuk mengerjakan sawahnya atas dasar petani berhak terhadap sebagai hasil pertanian tersebut.

Malikiyah menyatakan *muzara'ah* adalah persyerikatan (kerjasama) bagi hasil dalam bidang pertanian. Sementara itu Hanabilah mendefinisikan *muzara'ah* dengan:



Muzara'ah adalah menyerahkan lahan pertanian kepada petani atas dasar hasil pertanian dibagi untuk mereka berdua.⁶⁵

Menurut Imam Syafi'i *muzara'ah* adalah seseorang yang menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk ditanaminya, sedangkan hasilnya dibagi menurut kesepakatan bersama.⁶⁶

Dari definisi yang telah dikemukakan para ulama diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa *muza'ah* adalah “akad kerja sama tentang berhubungan dengan becocok tanam dengan imbalan tertentu atas hasilnya menurut kesepakatan bersama”. Namun Ulama Syafi'iyah

⁶⁴ Ridwansyah, *Mengenal Istilah-Istilah dalam Perbankan Syariah*, (Bandar Lampung: Augrah Utama Raharja, 2012), h. 17

⁶⁵ *Ibid*, h. 219

⁶⁶ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2016), h. 167

membedakan jika benihnya berasal dari pemilik tanah dinamakan *muzara'ah* sedangkan apabila benihnya berasal dari pihak pengelola dinamakan *mukhabarah*.

Terdapatnya beberapa definisi-definisi *muzara'ah* yang dikemukakan para ulama Fiqih yaitu:

- a. Menurut ulama Malikiyah mendefinisikan adalah perserikatan dalam pertanian.
- b. Ulama Hanabilah mendefinisikan adalah menyerahkan tanah pertanian kepada seseorang penggarap akan digarapnya ataupun hasil dibagi menjadi dua.
- c. Imam Syafi'i mendefinisikan adalah pengolahan tanah oleh petani disediakan penggarap tanah.

Jadi *muzara'ah* adalah kerjasama antaraa pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan benih (bibit) tanah berasal dari pemilik tanah. Bila dalam kerjasama ini bibit di sediakan oleh pekerja, maka secara khusus kerjasama ini disebut *Al-mukhabarah*.⁶⁷

Muzara'ah atau *mukhabarah* dalam istilah kebiasaan orang indonesia terutama orang pendesaan disebut dengan istilah "paroan sawah". Dan masyarakat sering mempraktekkannya, karena terdapat manfaat yang besr, baik bagi pemilik tanah sawah maupun bagi petani penggarap. Pemilik tanah sawah apa lagi luas ukurannya tidak

⁶⁷ Sabbiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), cet. Ke-1, h. 93

mungkin mengelola sawah sendiri, maka dia membutuhkan petani penggarap untuk membantunya. Begitu pula petani penggarap sangat terbantu apa lagi yang tidak mempunyai tanah sawah dapat mendapatkan mata pencaharian sesuai keahliannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.⁶⁸

Definisi-definisi diatas tersebut menunjukan adanya kaitan antara *muzara'ah* dengan *musaqah* dan *mukhabarah*. Pada kesemuanya ada kesamaan, yaitu adanya unsur kerjasama dalam pengelola lahan pertanian, serta pembagian hasil antara pemilik tanah dengan penggarap, sedangkan tentang perbedaan dengan *musaqah*, Al-Shan'ani dan Afzalur Rahman mengatakan bahwa *musaqat* adalah mempersewakan kebun dengan sistem bagi hasil. Sedangkan *muzara'ah* adalah mempersewakan sawah atau tanah dengan sistem yang sama. Hanya saja al-Sha'ani masih membedakan antara *muzara'ah* dnga *mukhabarah*. *Muzar'ah* adalah paroan sawah dengan syarat benihnya dari pemilik, sedangkan jika benihnya berasal dari penggarap maka hal itu disebut *mukhabarah*.

Dalam pengelola tanah dengan sistem ini, tuan tanah menerima bagian tertentu yang telah ditetapkan hasil dari produksi, biasanya $\frac{1}{2}$ (setengah), $\frac{1}{3}$ (sepertiga), $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari petani berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian dalam umumnya pembayaran yang diberikan dalam bentuk hasil bumi. Sistem ini seperti inilah yang

⁶⁸ *Ibid*, h. 168

dijalankn pada masa Rasulullah SAW yaitu ketika beliau meberikan tanah di Khaibar kepada orang Yahudi dengan sistem bagi hasil seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar: “Rasulullah SAW memberikan tanah Khaibar kepada orang-orang Yahudi dengan syarat mereka mau mengerjakan dan mengelola dan mengambil sebagian dari hasilnya.”⁶⁹

Muzara’ah termasuk dalam katagori perubahan yang diperbolehkan dalam Syariat Islam. Adapun alasan diperbolehkan *muzara’ah* ini karena Rasulullah SAW melakukan kerjasama perkebunan dengan penduduk Khaibar dan mereka mendapatkan sebagian hasil kebun pertanian itu. Alasan ini diperbolehkan karena ada kesepakatan dalil ulama *Fiqh* bahwa *Musaqah* merupakan suatu transaksi yang amat dibutuhkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁷⁰

Bahwa mengenai bagi hasil disini harus mengetahui, menurut bahasa bagi hasil adalah transaksi pengolahan bumi dengan (upah) sebagai hasil yang keluar dari padanya.

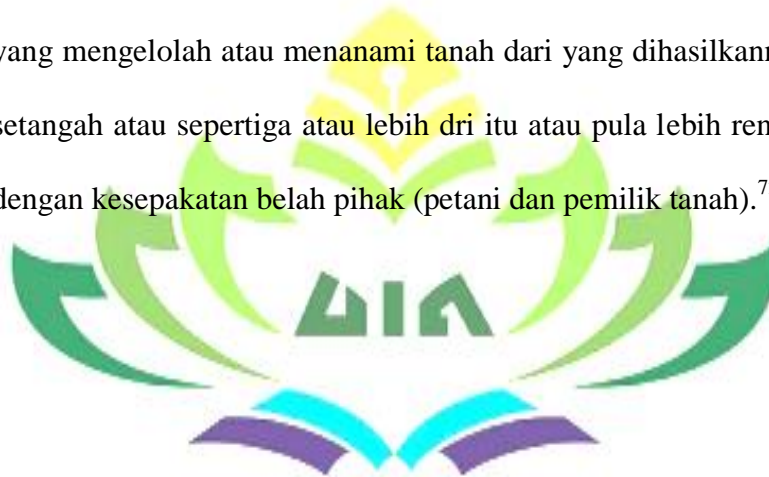
Perjanjian akad bagi hasil menjadi batal apabila pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola perkebunan atau pengelola berbuat sesuatu yang bertentangan dengan perjanjian. Dalam keadaan seperti ini pengelola bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian tersebut.

⁶⁹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, terjamah Soeroso, Nastangin, Jilid 2 (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 260-261

⁷⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 139

Dibolehkan kerjasama sistem bagi hasil mengingat ada pemilik kebun yang tidak mempunyai waktu untuk menggarap atau mengelola kebun sendiri, sebaliknya ada seseorang yang mempunyai waktu luang tetapi tidak mempunyai halangan untuk berkebun, yang penting bagi keduanya dibuat perjanjian tegas, bagi hasil pemilik kebun dan penggarap berupa sepenuh, sepertiga atau dua pertiga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.⁷¹

Yang dimaksud bagi hasil disini adalah pemberian hasil untuk orang yang mengelolah atau menanam tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah atau sepertiga atau lebih dri itu atau pula lebih rendah sesuai dengan kesepakatan belah pihak (petani dan pemilik tanah).⁷²



2. Dasar Hukum Muzara'ah

a. Dalam Al-Quran

Bentuk pengolahan semacam ini merupakan suatu cara yang dapat menumbuhkan kebajikan dan rasa simpati di hati manusia, sebab hal itu merupakan tindakan yang paling baik, yaitu dengan murah hati dan penuh kedermawanan memberikan kelebihan tanah yang dimiliki secara cuma-cuma kepada seorang muslim lainnya untuk dikelola.

Anjuran Rasulullah SAW itu berhasil merubah keseluruhan kehidupan

143 ⁷¹Abdul Mana, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2004), h,

⁷² Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, h. 146

masyarakat sehingga pada masa pemerintahan khalifah sangat kuat persaudaraan yang paling menonjol dalam pelaksanaan sistem dibandingkan naluri dan motivasi lainnya.⁷³

Dalam Al-Quran banyak yang menumbuhkan semangat untuk saling tolong-menolong dan berkerja dalam hal kebaikan.

Allah SWT berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ

ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah hanya Allah SWT, sesungguhnya Allah SWT sangat berat siksaannya”. (Q.S. Al-Ma'idah ayat 2)⁷⁴

Dalam surat Al-Maidah , Allah SWT memerintahkan agar dalam kehidupan bermasyarakat di tegakkan nilai tolong-menolong dalam kebajikan dan takawadan dan jangan sekali-kali tolong-menolong dalam mengerjakan keburukan.

Hadis Nabi SAW. mengarjakan bahwa orang yang meringankan kebutuhan hidup saudaranya akan diringankan kebutuhannya oleh

⁷³ *Ibid*, h. 267

⁷⁴ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 85

Allah SWT. Allah SWT akan menolong hamba-Nya selagi ia menolong saudaranya.⁷⁵

Allah SWT berfirman:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي

الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ

بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلَخِيًّا ۗ وَرَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhan mu? Kami telah menentukan antara mereka menghidupkan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah menggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rhmat Tuhan mu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (Q.S. Al-Zukhruf ayat 32)⁷⁶

Ayat ini menegaskan bahwa penganugrahan rahma Allah, apa lagi memberi wahyu semata-mata adalah wewenang Allah, bukan manusia, apakah mereka yang musyrik, durhaka dan bodoh itu yang dari saat kesaat dan secara kesenambungan membagi-bagi rahmat tuhan pemelihara dan pelimpah rahmat bagimu, wahai Nabi yang Agung, tidak kami telah membagi melalui penetapan hukum-hukumnya, kamu ditetapkan antara kalian serta berdasarkan kebijaksanaan mereka baik

⁷⁵ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gema Isnani Press, 2004), h. 34

⁷⁶ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 392

yang bersifat khusus maupun umum, mereka telah membagi-bagi sarana kehidupan dalam kehidupan didunia antara lain mereka tidak dapat melakukannya sendiri ataupun kami telah meningkatkan sebagian mereka dalam harta benda, ilmu, kekuatan maupun yang lain-lainnya atas sebagian yang lain meninggikan beberapa derajat agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian mana yang lainnya sehingga mereka dapat tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Allah SWT berfirman:



Artinya: “Pernakah kamu memperhatikan benih yang kamu tanam. Kamukah yang membutuhkannya ataukah kamikah yang menumbuhkan?”. (Q.S. Al-Waqi’ah ayat 63-64)⁷⁷

Dalam ayat diatas menjelaskan tentang beritahukanlah kepadaku tentang tanaman yang kamu tanam, apakah kamu yang menumbuhkan ataukah kami yang menumbuhkannya. Maksudnya apakah manusia yang membuatnya menjadi tanaman yang tumbuh ataukah Tuhan yang menjadikannya begitu. Dan diriwayatkan dari Hujr Al-Mundzir, bahwa apa bila Nabi SAW, membaca:

الزَّرْعُونَ نَحْنُ أَمْ تَزْرَعُونَهُ رَبِّ أَنْتُمْ

⁷⁷ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 428

Artinya: kamu kah yang menumbuhkannya ataukah kami yang menumbuhkannya dan ayat-ayat lain misalnya, maka beliau berkata: bahwa engkaulah ya rabbi.⁷⁸

Pada ayat diatas Allah menisbahkan kepada hamba-hambanya, bertani atau bercocok tanam, yaitu menaburkan benih kedalam tanah sedangkan bahwasanya:

- 1). Allahlah yang menumbuhkan tanaman tersebut.
- 2).Allahlah yang menumbuhkan tunas, membesarkan pohon-pohonnya, dan menambah dahan serta rantingnya.
- 3).Allahlah yang menumbuhkan bunga, dan membesarkan buahnya, sejak adanya buah itu muda dan tidak enak rasanya sampai menjadi buah yang besar dan mikmati oleh manusia.⁷⁹

b. Dalam Hadist

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزَعْهَا أَوَّلَيْمَنْحَهَا

أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ

Artinya: “Siapa yang mempunyai tanah, hendaklah tanah itu ditanaminya, atau berikan kepada saudaranya. Seandainya ia tidak

⁷⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Volume 12, (Jakarta: Letara Hati, 2010), h. 240-241

⁷⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirannya*, Jilid IX, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1995), h. 675

suka memberikan kepada orang lain, maka hendaklah tanah itu tetap dimilikinya”. (Hadist Riwayat Bukhari).⁸⁰

Kebanyakan para sahabat dan tabi'in membolehkan *muzara'ah*, demikian pula para Imam Mashab, sedangkan yang lainnya tidak melarang.

Dalil yang dipergunakan pihak yang membolehkan adanya kerja sama Rasulullah SAW, dengan penduduk Khaibar dengan persyaratan bahwa hasilnya apa yang dihasilkan dari tanah garapan tersebut, yaitu buah dari tanaman-tanamannya.⁸¹

Diriwayatkan oleh Abu Dawut dan Al-Nasa'i ataupun Rafi r.a dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda:



إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلَاثَ رَجُلٍ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا وَرَجُلٌ مُّسِيحٌ أَرْضُ فَهُوَ يَزْرَعُهَا وَرَجُلٌ اسْتَكْرَى أَرْضًا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ (رواه أبو داود والنسائي)

Artinya: “Yang boleh bercocok tanam hanya tiga macam orang: laki-laki yang ada tanah, maka dialah yang berhak menanamnya dan laki-laki yang disertai manfaat tanah, maka dialah yang menanamnya dan laki-laki yang menyewa tanah dengan mas atau perak.”⁸²

Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar r.a bawasanya Rasulullah SAW. mengadakan kerjasama penggarapan ladang

⁸⁰ Shahih Bukhari, *Terjemahan Hadist*, (Jakarta: Wijaya, 1992), h. 11

⁸¹ Abu bakar Jabir El-Jazari, *Pola Hidup Muslim*, (Bandung: PT Remaja Rosdakanya, 1991), h. 82

⁸² Abin Abdilah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majjah*, Jus 3, h. 819

kepunyaan penduduk Khaibar salah satu syarat-syarat yang di beri upah dari hasil tanah itu dan dari hasil buah-buahnya. Dari pekerjaan itulah beliau dapat memberikan nafkah 100 wasak (80 wasak buah kurma dan 20 wasak gandum) kepada istri-istrinya. Pihak yang melarang adanya kerjasama ini lantaran tidak jelas hasilnya mereka beralasan dengan menggunakan hadist Raf'i bin Khudaiz r.a ketika beliau mengatakan:

كُنَّا مِنْ أَكْثَرِ الْأَنْصَارِ حَقْلٌ . فَكُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَى أَنْ لَنَا هَذِهِ وَلَهُمْ هَذِهِ

فَرَمَّا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ فَفَنَهَا نَا عَنْ ذَلِكَ

Artinya: “Kami adalah pemilik tanah yang terluas dari kalangan Anshar, maka kami mengadakan kerja sama dalam penggarapan, dengan catatan si penggarap ini atau itu (hasil dari sini atau situ), akan tetapi barang kali ini menghasilkan sedangkan yang itu tidak. Oleh karena itu, kami dilarang melakukannya. (H.R. Mutafaq alaih)⁸³

Muzara'ah adalah suatu bentuk Syirkah, yaitu kerjasama antara modal (harta) dengan pekerjaan, dan hal tersebut dibolehkan seperti halnya akad mudharabah, karena dibutuhkan oleh masyarakat, dan orang yang menganggur bisa memperoleh pekerjaan.⁸⁴

⁸³ *Ibid*, h. 83

⁸⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi, 1013), h. 394

Paling tidak, hukum muzara'ah adalah *makruh tanzih*, yaitu dengan dalil perkataan Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW. tidak pernah melarang hal itu, bahkan beliau bersabda:

أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرَ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرَجًا مَحْلُومًا

Artinya: Selah seseorang di antara kamu adalah lebih baik untuk memberi garapan (*muzara'ah*) kepada saudara dari pada ia mengambil pajak tertentu atasnya. (H.R. Bukhari)

Riwayat dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan tanah Khaibar kepada penduduknya (waktu itu mereka masih yahudi) untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil tanaman-tanaman maupun buah-buahan.

Riwayatkan oleh Bukhari dari Jabir yang mengatakan bahwa bangsa arab senantiasa mengolah tanah secara *muzara'ah* dengan rasio bagi hasil 1/3:2/3, 1/4:3/4, 1/2:1/2, maka Rasulullah SAW pun bersabda: “hendaklah menanam atau menyerahkannya untuk digarap. Barang siapa tidak melakukan salah satu dari keduanya, tahanlah tanahnya”. (Muttafqun' Alaih)⁸⁵

Bukhari berbicara bahwa telah berkata Abu Jafar, “Tiak ada satupun rumah di madinah kecualinya penghuni pengelola tanah secara *muzara'ah* dengan pembagian hasil sepertiga ataupun seperempat. Hal ini sudah dilakukan oleh Sayyidina Ali, Sad bin Abi Waqash, Ibnu

⁸⁵Sunarto Zulkifli, *Transaksi Perbank syariah*, [Jakarta: Zikrul Hahim, 2003], h. 56

Mas'ud, Umar bin Abdul Aziz, Qasim, Urwah, keluarganya Abu Bakar ataupun keluarga Ali.⁸⁶

c. Ijma

Banyak sekali meriwayatkan yang menerangkan bahwa para sahabat telah melakukan praktek *muzara'ah* ataupun tidak ada dari mereka yang mengingkari kebolehan nya. Tidak adanya pengingkaran terhadap di perbolehkannya *muzara'ah* ataupun praktek mereka lakukan dianggapnya sebagai Ijma.⁸⁷

3. Rukun dan Syarat Muzara'ah

a. Rukun Muzara'ah

Menurut mayoritas ulama yang membolehkan akad muzara'ah atau mukhabarah rukun ada tiga yaitu:

- 1). Dua yang berakad (*aqidain*), yaitu pihak pemilik tanah dan pemilik pengelola.

Aqid adalah seseorang yang mengadakan akad, para mujtahit sepakat bahwa akad muzara'ah sah apa bila dilakukan oleh seorang yang telah mencapai umur, seseorang berakal sempurna, dan seseorang telah mampu berikhtiar.

- 2). Objek akad

Objek akad adalah berkaitan dengan tanah yang di tanami, benih, dan hasil panen.

⁸⁶ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah*, [Jakarta: Gema Isnani, 2005], h. 99

⁸⁷ Muhammad abdul Karim Ahmad Irsyid, *Al-Syamil Fi Muamalat wa Amalyyat Al-Masharif Al-Islamiyyah*, [Yodarnia: Dar An-Nafais, 2007], h. 151

Ma'qud ilaih artinya benda-benda yang berlaku pada hukum akad ataupun barang yang dijadikan objek pada akadnya. ini dijadikan rukun karena kedua belah pihak telah mengetahui wujud barangnya, sifat keduanya, serta harganya ataupun manfaat apa yang diambil. Dalam permasalahan ini tanah yang di pergunakan haruslah bermanfaat dan subur, hal ini menghindari kerugian baik tenaga maupun biaya dari masing-masing pihak yang bersangkutan.⁸⁸

3). Harus ada ketentuan bagi hasil

Menurut ketentuan dalam akad muzara'ah diperlukan di perhatikan ketentuan bagi hasil contohnya, sepertiga, setengah, seperempat, lebih banyaknya ataupun lebih sedikitnya dari ini. Hal itu harus diketahui dengan jelas untuk pembagiannya, karena masalahnya yang sering muncul kepermukaan dewasa ini dalam dunia perserikatan artinya masalah-masalah yang menyangkut pembagian hasilnya serta waktu pembiayaan. Pembagian hasil haruslah sesuai dengan kesepakatan bersama.⁸⁹

4). Sifat akad muzara'ah

Pendapat Hanfiah, sama dengan akad *syirkah* yang lainnya, artinya termaksud akad yang *ghair lazim* (tidak mengikat). Pendapat Malikiyah, apabila sudah dilakukan penanaman benih,

⁸⁸ Tengku Muhammad Hasbi A-Shiddeqy, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, [Jakarta: Bulan Bintang, 1998, h. 23

⁸⁹ Syeh Muhammad Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, [Jakarta: Bina Ilmu, 2001], h. 384

maka akad menjadi lazim (mengikat). Akan tetapi, menurut pendapat yang mu'tamad (kuat) di kalangan Malikiyah, semuanya *syirkahamwal* pendapat Hanabilah, *muzara'ah* dan *musaqah* merupakannya akad yang ghair lazim (tidak mengikat), yang bisa di batalkan oleh masing-masing pihak, ataupun membatalkan karena meninggalkan salah satu pihak.⁹⁰

5). Ijab dan Qabul (shighad)

Sedangkan menurut Hanafiah rukum *muzara'ah* atau *mukhabarah* hanya ijab dan qabul.

Ijab adalah ungkapan penyerahan tanah dari pihak pemilik tanah. Adapun qabul adalah ungkapan penerimaan dari pihak petani penggarap untuk penggarap tanah. Misalnya pihak pemilik tanah berkata kepada pihak petani penggarap: “ saya serahkan tanah ini kepada mu untuk di garap dan hasilnya dibagi dua”. Kemudian pihak petani penggarap menjawab; “saya terima”.⁹¹

Akad ini diwujudkan melalui pertama adanya ijab dan qabul. Ijab artinya pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan. Sedangkan qabul artinya pernyataan pihak keduanya untuk menerima. Ijab ataupun qabul ini di adakan untuk menunjukan adanya sukarela timbal balik terhadap akad yang melakukan kepada kedua belah pihak yang bersangkutan. Adanya

⁹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, h. 394

⁹¹ Eneng Hidayat, *Op. Cit.*, h. 173-174

sesuaian dengan kehendak Syariat. Adalah bahwa keseluruhan akad yang di perjanjikan oleh kedua belah pihak ataupun lebih, (baik dari objek perjanjian, aktivitas yang dilakukan ataupun tujuan) dianggapnya benar apa bila sesuai ataupun sejalan dengan ketentuan hukum Islam.⁹²

a). Pemilik tanah ataupun penggarap tanah, dalam hal ini disyaratkan harus baligh dan berakal (mumayyiz).

b). Tanah garapan, dalam hal ini disyaratkan:

(1). Tanahnya jelas ataupun tidak bermasalah (sengketa).

(2). Tanahnya memungkinkan untuk di garap, yaitu apa bila ditanami bisa mendapatkan hasilnya, Biaya ataupun modal penggarapan (pengolahan) tanah, dalam hal ini disyaratkan:

(a). Jenis nilinya.

(b). Dapat di manfaatkan.

(3). Ijab dan qabul (akad), dalam hal ini disyaratkan:

1. Dilakukan atas kesepakatan bersama, artinya antara pemilik modal ataupun penggarap tanah.

2. Tidak ada salah satu pihak yang di rugikan.

3. Dapat di terima kepada pemilik tanah dengan penggarap adalah mungkin untuk di lakukan kerjasama ataupun tidak ada keterpaksaan.⁹³

b. Syarat-syarat muzara'ah

⁹² Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, [Jakarta: Sinar Grafika, 2013], h. 6

⁹³ A. Khumedi Ja'far, *Op. Cit.*, h. 162

Menurut Nasrun Haroen yang dikemukakan oleh Hanafiah menambahkan bahwa salah seorang atau keduanya bukan orang yang murtad (keluar dari agama Islam), karena tindakan hukum orang yang murtad *mauqud* (tidak punya efek hukum, sampai ia masuk Islam kembali).

Abu Yusuf dan Muhammad ibn Al-Hasan Asy-Syaibani tidak menyetujui syarat tambahan ini karena, menurut mereka, akad *al-muzara'ah* boleh dilakukan antara muslim dengan non muslim, termasuk orang yang murtad.⁹⁴

Adapun syarat yang berhubungan dengan ijab dan qabul (*shighad*) dalam hal ini sama syaratnya dengan syarat ijab dan qabul kaitannya dengan syirkah sebagaimana telah dikemukakan di atas.

Ulama Syafi'iyah mensyaratkan *muzara'ah* sebagai berikut:

1. Tunggalnya petani penggarap. Maksudnya petani penggarap dalam *musaqah* adalah petani penggarap dalam *muzara'ah* juga. Jika berbeda orang, maka hukumnya tidak sah.
2. Bersatunya kedua akad (*muzara'ah* dan *musaqad*). Maksudnya kedua belah pihak tidak memisahkan antara *musaqah* dan *muzara'ah*, akan tetapi menyatukannya. Jika pemilik tanah berkata kepada petani penggarap: “saya melakukan akad *musaqad* dengan mu”. “Petani penggarap menjawab ‘saya terima’”. Kemudian keduanya melakukan akad *muzara'ah* terhadap tanah kosong atau

⁹⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, [Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007], h. 278

tanah yang tidak ada pepohonan di dalamnya (*al-bayadh*), yang bisa di manfaatkan untuk petani, maka akad muzara'ah tersebut tidak sah.

3. Akad tidak boleh mencangkup penyewaan tanah imbalan sesuatu yang melarang, artinya dengan menjadikan tanah sebagai imbalan benih (bibit). Dengan demikian, pendapat Malikiyah bibit (benih) harus di tanggung oleh petani karena tanah tersediakan oleh pemilik, maka *muzara'ah* menjadi *fasid*.
4. Kedua belah pihak yang berserikat artinya pemilik lahan ataupun petani harus mempunyai hak-hak yang sama-sama dalam keuntungan (hasil) yang didapatkan, sesuai dengan modal atau (biaya) yang dikeluarkannya.
5. Benih yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak harus sama-sama sejenisnya, apabila berbeda, contohnya pemilik mengeluarkan benih padi, sedangkan petani mengeluarkan benih jagung, maka *muzara'ah* menjadi *fasid*.⁹⁵

Alasannya karena di perbolehkan muzara'ah itu karena mengikuti akad musaqad yaitu:

- a. Pemilik lahan untuk menyerahkan lahan yang akan di garap kepada pihak-pihak yang akan menggarap.
- b. Petani wajib memiliki skil atau keterampilan bertani atau bersedianya menggarap lahan yang di terimanya.

⁹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, h.399

- c. Penggarap wajib memberikan keuntungannya kepada pemilik lahan bila mengelola yang dilakukan menghasilkan keuntungan.
- d. Akad muzara'ah dapat dilakukan secara mutlak dan ataupun terbatas.
- e. Jenis bibit yang akan ditanam dalam *muzar'ah* terbatas harus dinyatakan secara pasti dalam akad, atau diketahuinya oleh penggarap.
- f. Penggarap bebas memilih jenis benih yang ditanam untuk ditanam dalam akad *muzara'ah* mutlak.
- g. Penggarap wajib memperhatikan ataupun mempertimbangkan kondisi lahan, keadaan cuaca, dengan cara yang memungkinkan untuk mengatasi menjelang musim tanam.
- h. Penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan dalam akad muzara'ah mutlak.⁹⁶
- i. Petani atau pemilik modal dapat melakukan kesepakatan mengenai bagian-bagian jumlah hasil pertanian yang akan diterima kepada masing-masing pihak.
- j. Pelanggaran yang dilakukan petani dalam akad *muzara'ah* dapat mengakibatkannya batal akad ini.
- k. Seluruh hasil panen yang dilakukan oleh penggarap yang melakukan pelanggaran atau penyimpangannya, menjadikan milik pemilik lahan.

⁹⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, [Jakarta: PT Interpramata Mandiri, 2015], h. 238

- l. Dalam hal penggarap melakukan pelanggaran, memiliki lahan yang di anjurkan untuk diberikan upah atau imbalan dengan kerjanya yang sesuai dilakukan petani..
- m. Penggarap berhak melanjutkan akad muzara'ah jika tanamannya belum layak di panen, meskipun pemilik lahan telah meninggal dunia.
- n. Ahli waris pemilik lahan wajib melakukan kerja sama muzara'ah yang melakukan pihak yang meninggal, sebelum tanaman pihak si petani bisa dipanen.
- o. Hak penggarap lahan bisa dipindah dengan cara di wariskan bilamana petani meninggal dunia, sampai tanamannya bisa dipanen.
- p. Ahli waris petani berhak untuk meneruskan ataupun membatalkannya akad muzara'ah yang melakukan oleh pihak yang meninggal.⁹⁷
- q. Tidak murtad, ini merupakan pendapat Abu Hanifah, sedangkan dua murid Abu Hanifah (Abu Yusuf dan Muhammad As-Syaibani) tidak mensyaratkan hal ini. Menurut mereka *muzara'ah* tetap sah walaupun salah satu seseorang murtad.
- r. Objek muzara'ah di syatkan:
- 1) Benih, diketahui jenis benih dan menurut kebiasaan ditanam dapat dan menghasilkan.

⁹⁷*Ibid*, h. 239

2) Lahan pertanian di syaratkan:

- a) Dapat di tanam atau di olah.
- b) Diketahui batas-batasnya.
- c) Pengolahan tanah diserahkan sepenuhnya kepada petani. Bila pemilik lahan ikut terlibat dalam pengolahan, akad muzara'ah batal.

3) Hasil pertanian di syaratkan:

- a) Menjadi hak berserikat antara petani dan pemilik lahan maka hasil pertanian tidak boleh menjadi milik pihak tertentu saja dari dua orang yang berakad.
- b) Kadar pembagian masing-masing pihak harus jelas, seperti separo, sepertiga, seperempat, atau sejenisnya.
- c) Batas waktu muzara'ah harus diketahui dan disepakati dan disepakati ketika akad serta sesuai dengan masa dan kebiasaan pengolahan tanaman. Karena akad muzara'ah mengandung makna ijarah (upah mengupah) dengan imbalan hasil pertanian. Oleh karena itu, jangka waktunya disesuaikan dengan kebiasaan setempat.⁹⁸
- d) Hasil panen benar-benar milik bersama orang-orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti penyisihan terlebih dahulu beberapa persen.

⁹⁸ Rozalianda, *Op. Cit.*, h. 221-222

- e) Pembagian antara amil dan shohibul mal artinya dari satunya sejenis barang yang sama.
 - f) Pembagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui.
 - g) Tidak di syaratkan dibagi salah satunya penambahan yang maklum.
- 4) Syarat yang berkaitan dengan waktu pun harus jelas di dalam akad, sehingga pengelola tidak di rugikan seperti pembatalan akad sewaktu-waktu.
- a) Waktu yang telah ditentukan.
- Waktu itu sangat memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud.
- b) Waktu tersebut memungkinkan kedua belah pihak hidup menurut kebiasaan.
- 5) Syaratnya yang berhubungan berupa peralatan-peralatan *muzara'ah*, peralatan-peralatan tersebut disyaratkn baik berupa hewan (tradisional) ataupun yang lain dibebankan kepada pemilik hewan.⁹⁹
- 6) Syarat tanaman

Syarat yang berlaku untuk tanaman artinya harus jelas (diketahui). Dalam hal ini menjelaskan apa yang akan ditanami. Namun dilihat dari segi istilah, penjelasan sesuatu yang akan ditanami tidak menjadi syarat *muzara'ah* karena

⁹⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, [Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013], h. 276-277

apa yang akan ditanami diserahkan sepenuhnya kepada petani.

Ulama Syafi'iyah tidak mensyaratkan persamaan hasil yang diperoleh oleh kedua aqid dalam *muzara'ah* yang mengikuti atau berkaitan dengan *musaqah*. Mereka berpendapat bahwa *muzara'ah* adalah pengolahan atau penggarapan tanah dengan imbalan atas apa yang dikeluarkan dari padanya, sedangkan bibit (beninya) berasal dari pemilik tanah

Ulama Hanabilah sebagaimana ulama Syafi'iyah, tidak mensyaratkan persamaan dan penghasilan dua orang yang berakad. Namun demikian, mereka mensyaratkan lainnya:

- a). Benih berasal dari pemilik, tetapi diriwayatkan bahwa Imam Ahmad membolehkan benih berasal dari penggarap.
- b). Kedua orang yang melakukan akad harus menjelaskan bagian-bagian masing-masing.
- c). Mengetahui dengan jelas jenis benihnya. Demikian pula kadarnya. Oleh karena itu *muzara'ah* artinya akad atas pekerjaan, sehingga apabila yang akan dipekerjakan tidak jelas jenisnya atau kadarnya maka hukumnya tidak sah.

4. Akibat Muzara'ah

Menurut Jumhur Ulma (yang membolehkan akad muzara'ah), apabila akad telah memenuhi rukun dan syarat, maka akibat hukum adalah:

- a. Petani bertanggung jawab mengeluarkan biaya bibit dan pemeliharaan tersebut.
- b. Semua pengeluaran petani seperti pupuk, biaya perairan, serta biaya pembersihan tanaman, di tanggung oleh penggarap jika pemilik tanah sesuaikan dengan presentase bagian masing-masing.
- c. Hasil panen di bagi sesuai dengan kesepakatan bersama.
- d. Pengairan dilakukan sesuai kesepakatan bersama dan apabila tidak ada kesepakatan, berlaku kebiasaan di tempat masing-masing.
- e. Apabila salah satu seorang meninggal dunia sebelum panen, maka akad tetap berlaku sampai waktu panennya, jika yang meninggal di wakili oleh ahli warisnya. Lebih lanjut, suatu akad yang dapat di pertimbangkan oleh ahli waris, apakah akan dilanjutkan atau berhenti.¹⁰⁰

5. Muzara'ah yang di bolehkan

Berikut ini ada bentuk-bentuk sistem bagi hasil dianggap sah yaitu:

- a. Perjanjian kerjasama dalam pengolahan dimana tanah milik satu pihak, peralatan pertanian, benih dan tenaga kerja dari pihak lain, keduanya

¹⁰⁰ *Ibid*, h. 279

menyetujui bahwa pemilik tanah akan memperoleh bagian tertentu dari hasil panen.

- b. Apabila tanah, peralatan pertanian atau bibit, semuanya akan dibebankan kepada pemilik tanah sedangkan hanya tenaga kerja yang akan dibebankan kepada pemilik tanah maka dari itu ditetapkan pemilik tanah mendapatkan sebagian tertentu suatu hasil panen.
- c. Perjanjian dimana tanah atau bibitnya dari si pemilik modal sedangkan alat-alat pertanian dan tenaga kerja artinya dari penggarap, dalam pembagian suatu hasil tersebut akan ditetapkan secara profesional.
- d. Apabila keduanya bersepakat atas tanah, alat-alat pertanian, bibit atau tenaga kerja serta menetapkan sebagian masing-masing yang akan mendapatkan suatu hasilnya.
- e. Imam Abu Yusuf menggambarkan bentuk muzara'ah yang diperbolehkan bahwa: "Jika tanah yang diberikan secara cuma-cuma kepada seseorang untuk digarap, semua pembiayaan pengolahan ditanggung oleh penggarap dan keseluruhan semua jumlah menjadi miliknya, tetapi Kharaj untuk di bayar kepada pemilik modal. Dan suwatu tanah tersebut adalah Ushri, akan dibayar oleh petani.
- f. Apabila tanah berasal dari satu pihak dan kedua belah pihak bersama menanggung bibit, buruh dan pembiayaan-pembiayaan pengolahannya, dalam hal ini keduanya akan mendapatkan bagian dari hasil. Jika hal itu merupakan 'Ushri' yang harus dibayar berasal dari hasil dan jika tanah itu Kharaj' akan dibayar oleh pemilik tanah.

- g. Apabila tanah di sewakan kepada seseorang dan itu merupakan Kharaj, maka pendapat imam Abu Hanifah, Kharaj akan di bayar kepada pemilik tanah dan tanah itu 'Ushri', Ushr akan dibayar olehnya, tetapi pendapat imam Abu Yusuf, jika tanah itu 'Ushri', Ushr akan dibayar kepada penggarap.
- h. Apabila perjanjian muzara'ah ditetapkan dengan sepertiga atau seperempat dari hasil, maka menurut Imam Abu Hanifah, keduanya Kharaj dan Ushr akan dibayar oleh pemilik tanah.¹⁰¹

6. Bentuk Pengolahan yang Dianggap Terlarang oleh Para Ahli Fiqih

Dalam *muzara'ah* semua syarat-syarat yang pengurusnya tidak jelas ataupun dapat menyebabkan perselisihan atau hilangnya berbagai pihak dianggap terlarang.

Rasulullah SAW hanya melarang bentuk pengolahan semata-mata karena alasan sebagaimana yang dijelaskan oleh Laiss dalam ucapannya berikut ini: "Beentuk-bentuk pengolahan yang terlarang oleh Rasulullah SAW yaitu manakala tidak seseorangpun yang mempunyai kepandaian dan kesadaran tentang yang benar yang salah lalu menanggapiya itu diboolehkan karena itulah maka akan membahayakan hak-hak (petani).

Salah satu bentuk perjanjian yang menetapkan sejumlah hasil tertentu yang harus diberikan antara lain:

- a. Suatu macam perjanjian yang sudah ditetapkan dengan jumlah hasil tertentu yang harus diberikan kepada pemilik tanah karena suwatu

¹⁰¹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, [Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995], h. 286-287

syarat yang menentukan bahwa apapun hasilnya yang diperoleh pemilik tanah tetap akan menerima lima ataupun sepuluh dari hasil panen.

- b. Apabila hanya sebagian-bagian tertentu dari lahan yang ada diproduksi. contohnya sebagian utara atau sebagian selatan dan lain-lainnya maka bagian-bagian tersebut di peruntukan bagi pemilik modal.
- c. Apabila hasil yang ada di bagian tertentu, contohnya disekitar aliran sungai yang di daerah yang mendapatkan cahaya matahari, jadi hasil diwilayah tanah tersebut di simpan untuk pemilik tanah, semua bentuk-bentuk pengolahan semacam itu dianggap terlarang karena bagian bentuk satu pihak telah di tentukan sementara bagian pihak lainnya masih kepada keberuntungan yang membaik ataupun memburuk sehingga ada seorang pihak lain dirugikan.
- d. Penyerahan tanah kepada seseorang dengan syarat tanah tersebut tetap akan menjadi miliknya jika sepanjang pemilik tanah masih menginginkannya dan akan menghapus pemiliknya manakala pemilik tanah menghendakinya.

Karena dalam suatu hal yang mengandung unsur ketidak adilan bagi para penggarap untuk membahayakan hak-hak mereka dengan adanya penarikan tanah yang telah menjadi milik mereka bisa menimbulkan kesengsaraan dan kemelaratan. Oleh karena itu syarat

yang paling penting untuk keabsahan muzara'ah yaitu dengan menentukan jangka waktu persetujuan.

- e. Ketika petani dan pemilik tanah sepakat membagi hasil tanah tapi suwatu pihak menyediakan benih pihak yang lainnya alat pertanian.
- f. Apabila tanah menjadi milik pertama, bibit yang di bebaskan kepada pihak kedua, alat-alat pertanian kepada pihak ketiga dan tenaga kerja kepada pihak keempat, dan dalam hal ini tenaga kerja atau alat-alat pertanian termasuk bagian dari pihak ketiga.
- g. Perjanjian pengolahan menetapkan tenaga kerja dan tanah menjadi tanggung jawab pihak pertama atau bibinya serta alat-alat pertanian kepada orang lainya.
- h. Bagian seseorang harus ditetapkan dalam jumlah, contohnya sepuluh atau dua puluh maund gandum untuk satu pihak atau sisanya kepada pihak lain.
- i. Ditetapkan jumlah tertentu dari hasil panen yang harus di bayar kepada satu pihak selain dari bagiannya dari hasil tersebut.
- j. Adanya hasil panen lainnya (selain dari pihak yang di tanami di ladang dan di kebun harus dibayar kepada salah satu seseorang sebagai tambahan pada hasil yang mengeluarkan tanah.

Singkat perjanjian dengan sistem muzara'ah akan sah hanya apabila tidak seseorang pun tadak ada di korbankan haknya, atau tidak ada pemanfaatan tidak secara adil atas kelemahan dan kebutuhan seseorang, dan tidak boleh ada syarat-syarat yang sejenisnya yang

dapat menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak, dan tidak ada satu pun syarat yang tidak di beri ketetapan pada saat perjanjian itu berlangsung yang mungkin membahayakan hak salah satu dari kedua belah pihak.¹⁰²

7. Zakat Muzara'ah

Dalam hal ini zakat diwajibkan semua seseorang yang mempunyai jenis bibit [benih], sehingga pada muzara'ah yang diwajibkan zakat adalah penggarap tanah sebab pada hakikatnya dialah yang bertanam, yang punya tanah seolah-olah mengambil sewa tanahnya, sedangkan penghasilannya dari sewa tidak wajib di keluarkan zakatnya.¹⁰³

8. Berakhirnya Muzara'ah

Muzara'ah terkadang berakhir karena telah terwujudnya maksud dan tujuan akad, misalnya tanaman telah dipanen. Akan tetapi, terkadang akad *muzara'ah* berakhir sebelum terwujudnya tujuan *muzara'ah* karena sebab-sebab berikut:

a. Habis batas waktu muzara'ah

Apabila waktu akad muzara'ah berakhir, akad *muzara'ah* berakhir. Maka hasil pertanian di bagi berdasarkan kesepakatan diantara keduanya. Namun, bila akad muzara'ah telah berakhir, sedangkan tanaman yang di tanami belum panen maka akad *muzara'ah* tetap berlangsung sampai masa panen. Namun, petani berhak menerima

¹⁰² *Ibid*, h. 287-289

¹⁰³ A. Khumedi Ja'far, *Op. Cit.*, h. 163

upah dari pekerjaan dengan memelihara lahan pertanian di luar akad *muzara'ah*.

b. Salah seseorang yang berakad meninggal dunia, menjadi akad *muzara'ah* berakhir. Baik meninggalnya petani menggarapan atau sesudahnya, baik buahnya sudah bisa di panen atau belum. Pendapat ini dikemukakan oleh Hanafiyah dan Hanabiyah. Akan tetapi menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, *muzara'ah* tidak berakhir karena meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Sama halnya dengan akad *ijarah* yang berakhirnya dengan meninggalnya salah satu orang yang berakad.

c. Akad fasakh disebabkan adanya unzur (halangan) yang menyebabkan terhalangnya kedua belah pihak melangsungkan akad dengan *muzara'ah* di antaranya:

1. Pemilik lahan terbelenggu yang mengakibatkan dia pailit sehingga tanah yang sedang di garap harus harus di jual kepada pihak lain dan tidak ada harta yang lain selain tanah tersebut.
2. Pemilik lahan mempunyai halangan, seperti harus melakukan perjalanan sehingga tidak dapat melangsungkan akad.

d. Menurut ulama Hanafiah dan Hanabilah, apabila salah seorang yang berakad wafat, akad *muzara'ah* berakhir, karena mereka berpendapat bahwa akad *al-ijarah* tidak boleh diwariskan. Akan tetapi ulama Malikiyah dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa alad *al-muzara'ah*

itu di wariskan. Oleh sebab itu, maka tidak berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang berakad.¹⁰⁴

9. Hikmah Mura'ah

Ada beberapa hikmah muzara'ah antara lain:

- a. Tanah yang semula tersia-sia (kurang tidak di pergunakan) dapat di manfaatkan dengan sebaik-bainya.
- b. Dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang menganggur untuk memelihara tanah dan memperoleh hasilnya.
- c. Tanah yang semula tidak terawat dan tidak di pelihara oleh pemiliknya dapat di pelihara atau dikelola dengan baik.
- d. Dapat menumbuhkan sikap tolong menolong dan kepedulian terhadap orang lain.
- e. Dapat menciptakan hubungan persaudaraan yang baik antara pemilik tanah dan penggarap.¹⁰⁵
- f. Terwujudnya kerjasama saling menguntungkan antara pemilik tanah dengan penggarap.
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- h. Tertanggulangnya kemiskinan.¹⁰⁶

¹⁰⁴ Nasrun Haroen, *Op. Cit.*, h. 280-281

¹⁰⁵ A. Khumedi Ja'far, *Op. Cit.*, h. 163-164

¹⁰⁶ Sabbiq, Sayyid, *Op. Cit.*, h. 97

BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Desa Sendang Ayu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah

1. Sejarah Berdirinya Desa Sendang Ayu

Sendang Ayu berasal dari dua kata yaitu Sendang yang artinya pemandian dan Ayu yang berarti cantik jika diartikan kedalam bahasa Indonesia menjadi tempat pemandian yang cantik atau indah. Asal muasal diambil kata ini adalah karena Desa Sendang Ayu dialiri beberapa aliran sungai yang dahulu alirannya sangat jernih, sungai-sungai disini ada yang berasal dari sumber mata air dari gunung dan ada pula yang berasal dari terusan aliran sungai dari daerah lain.¹⁰⁷

Desa Sendang Ayu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah berdiri sejak tahun 1950-an, dengan kepemimpinan pertama ialah bapak Sarmudi. Kepemimpinannya berlangsung cukup lama, sekitar 15 tahun dan kemudian berakhir tahun 1975. Pemerintahan selanjutnya di pimpin oleh bapak Seno pada tahun 1975 sampai tahun 1994, sejak saat itu hingga tahun 1994 terjadi masa pertukaran kepemimpinan, yaitu dimana pemerintah di kendalikan oleh pejabat sementara. Tahun 1994 hingga tahun 2004 di tahun berikutnya tahun 2004 hingga tahun 2013 pemerintahan di pimpin oleh bapak Sutarjo, dan pada tahun 2013 Desa

¹⁰⁷ Edi Sukari (Kepala Desa), *Dokumentasi Desa Sendang Ayu dan Wawancara*, Sendang Ayu, Maret 2018

Sendang Ayu dipimpin seorang Kepala Desa yang bernama Edi Sukarni.¹⁰⁸ Sejak berdirinya Desa Sendang Ayu tahun 1950-an sampai saat ini, pemerintahan Desa Sendang Ayu telah dipimpin oleh 5 (lima) Kepala Desa dengan mengalami pergantian Kepala Desa sebagai berikut:

Tabel. 1

Masa JabataKepala Desa Sendang Ayu

No	Nama Kepala Kampung	Tahun
1	Sarmudi	1960-1975
2	Seno	1975-1994
3	Masrukin	1994-2004
4	Sutarjo	2004-2013
5	Edi Sukari	2013-2018

(Sumber: Monografi Desa Sendang Ayu Tahun 2018)

2. Kondisi Geografis, Penduduk, dan Pemerintahan Desa Sendang Ayu

a. Letak dan Luas Wilayah

Desa Sendang Ayu memiliki luas wilayah 4000 M, yang dibagi menjadi 2.000 hektar untuk pemukiman dan 900 hektar pertanian (sawah tadah hujan), perkebunan 1.100 Hektar dan terdiri dari 10 dusun dan 19 RT, batasan desa sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Purwosari
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Umbul Solo

¹⁰⁸ Pendataan Kependudukan Desa Sendang Ayu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Purwodadi

d. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sidomulyo

3. Kondisi Demografis

Desa Sendang Ayu secara administrative termasuk Wilayah Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung dengan orbitasi yaitu :

- a. Jarak desa Sendang Ayu ke kantor Kecamatan Padang Ratu kira-kira 7 km, dengan jangkauan waktu kira-kira 26 Menit menggunakan kendaraan bermotor.
- b. Jarak desa ke Kantor Gubernur sekita 30 km, dengan jangkau waktu kira-kira 1 Jam saat lenggang dan 1.30 menit ketika lalu lintas ramai.
- c. Jarak desa ke kantor Kabupaten kurang lebih 35 Km, dengan waktu jangkau kira-kira 1.50 menit dengan kendaraan bermotor.

4. Keadaan Sosial

Desa Sendang Ayu memilikijumlah penduduk 1.100 jiwa, tersebut dalam 40 RT yang terdiri dari 560 jiwa laki-laki dan 540 perempuan. Berikut data jumlah penduduk Desa Sendang Ayu.¹⁰⁹

Tabel 2.
Jumlah penduduk Desa Sendang Ayu berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin Penduduk	Jumlah	Presentasi
1	Laki-laki	560 Jiwa/Orang	
2	Perempuan	540 Jiwa/Orang	
Jumlah Total		1.100 Jiwa/Orang	100 %

(Sumber: Monografi Desa Sendang Ayu Tahun 2018)

¹⁰⁹ Pendataan Kependudukan Desa Sendang Ayu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018

Tabel 3.
Jumlah penduduk Desa Sendang Ayu berdasarkan Etnis / Suku

No	Etnis	Jumlah	Presentase (%)
1	Jawa	1.084	
2	Lampung	4 Jiwa/ Orang	
3	Sunda	12 Jiwa/Orang	
Jumlah Total		1.100	100

(Sumber: Monografi Desa Sendang Ayu Tahun 2018)

Tabel 4.
Jumlah penduduk Desa Sendang Ayu berdasarkan agama/kepercayaan

No	Agama / Kepercayaan	Jumlah	Presentase (%)
1	Islam	1.080 Jiwa/Orang	
2	Kristen Protestan	20 Jiwa/Orang	
3	Kristen Katolik	-	
4	Hindu	-	
5	Budha	-	
Jumlah Total		1.100	100

(Sumber: Monografi Desa Sendang Ayu Tahun 2018)

Tabel 5.
Jumlah penduduk Desa Sendang Ayu berdasarkan tingkat pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase (%)
1	Pra Sekolah	50 Jiwa/Orang	
2	Taman Kanak- kanak	60 Jiwa/Orang	
3	SD	110 Jiwa/Orang	
4	SMP/SLTP	150 Jiwa/Orang	
5	SMA/SLTA	111 Jiwa/Orang	
6	Sarjana 1-3	50 Jiwa/Orang	
Jumlah Total		531 Jiwa/Orang	100

(Sumber: Monografi Desa Sendang Ayu Tahun 2018)

Tabel 6.
Jumlah Dusun di Desa Sendang Ayu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah

No	Nama Dusun	Jumlah RT
1	Dusun I Delmok	2 RT
2	Dusun II Umbul Lesung	2 RT

3	Dusun III Bedeng	2 RT
4	Dusun IV Wiluna	2 RT
5	Dusun V Banjar Ratu	1 RT
6	Dusun VI Umbul Buntung	2 RT
7	Dusun VII Singaparna	2 RT
8	Dusun VIII Umbul Gunung	2 RT
9	Dusun IX Banjar Negara	2 RT
10	Dusun X Bukit	2 RT
Jumlah Total		19 RT

(Sumber: Monografi Desa Sendang Ayu Tahun 2018)

Tabel 7.

Sarana dan Prasarana Desa Sendang Ayu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah

No	Sarana dan Prasarana Desa Sendang Ayu	Jumlah
1	Balai Desa	1 Unit
2	Masjid	10 Unit
3	Mushola	7 Unit
4	Klinik KB	3 Unit
5	Puskesmas	-
6	Gedung Posyandu	10 Unit
7	Gedung SD Negeri	2 Unit
8	Gedung Madrasah Ibtidaiyah/MI	1 Unit
9	Gedung Paud/TK	3 Unit
10	Jembatan	5 Unit

(Sumber: Monografi Desa Sendang Ayu Tahun 2018)

Tabel 8.

Mata Pencarian penduduk Desa Sendang Ayu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah

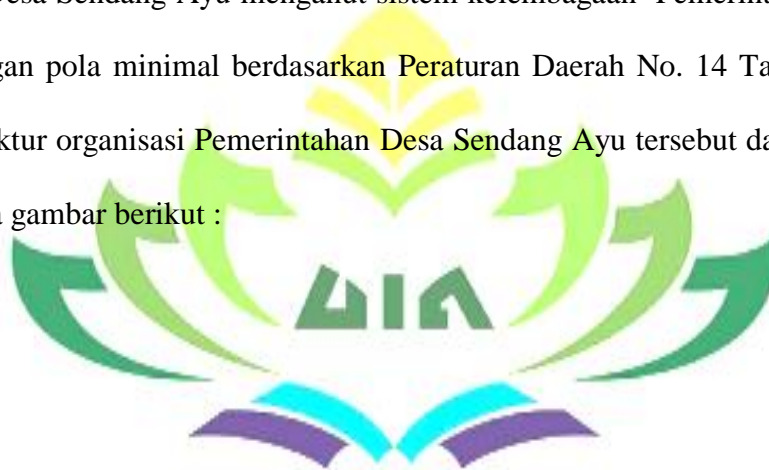
No	Golongan Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Petani	320	250	570
2	Pedagang	60	50	110
3	PNS	20	15	35

4	Buruh	90	104	194
5	Pensiunan	8	4	12
6	TNI/POLRI	1	-	1
7	Tukang	20	18	38
8	Lain-lain	80	60	140
Jumlah		599	501	1.100

(Sumber: Monografi Desa Sendang Ayu Tahun 2018)

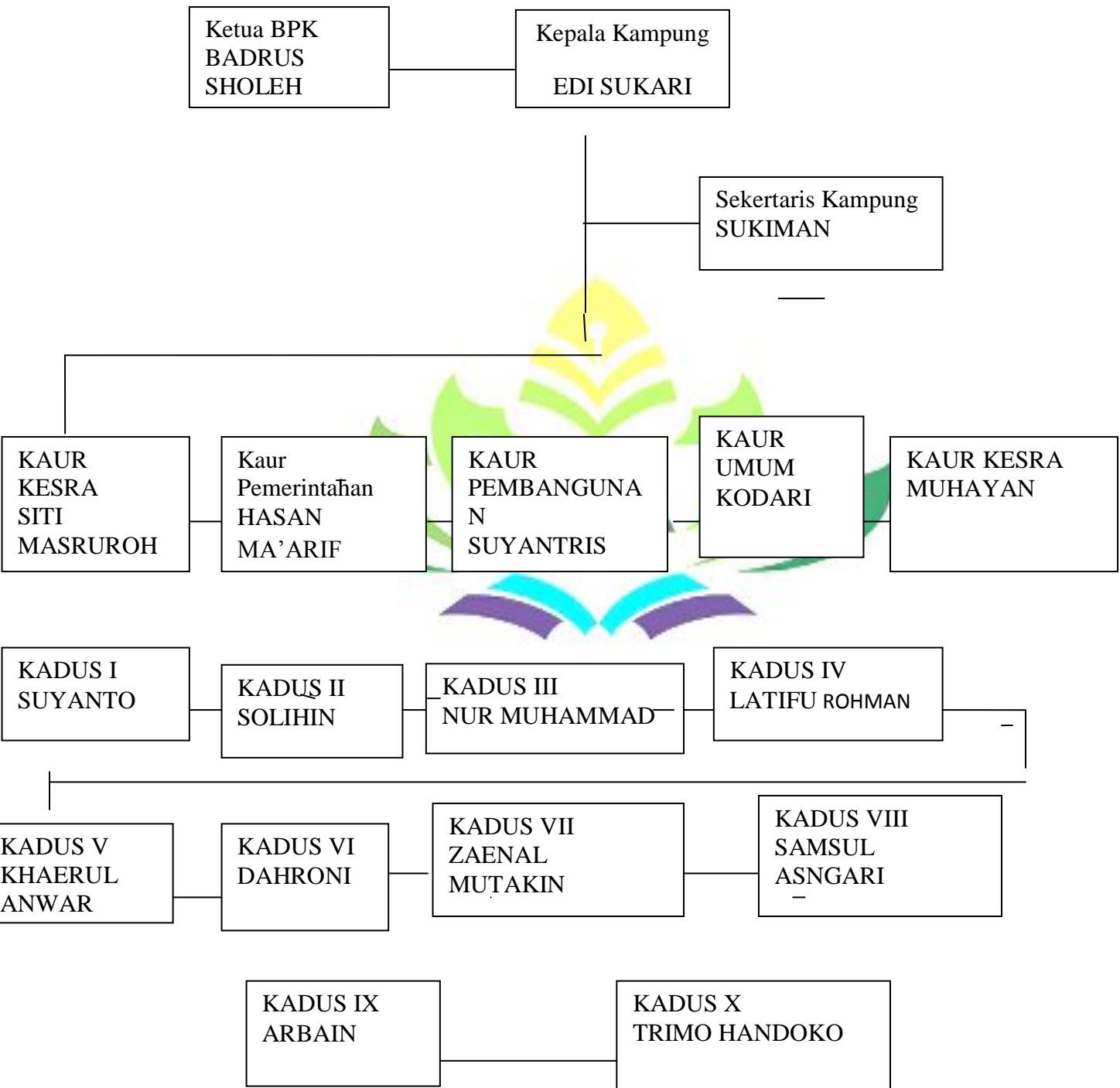
5. Struktur Organisasi Desa Sendang Ayu

Desa Sendang Ayu menganut sistem kelembagaan Pemerintahan Desa dengan pola minimal berdasarkan Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2005. Struktur organisasi Pemerintahan Desa Sendang Ayu tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :



STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA SENDANG AYU KEC.

PADANG RATU KAB. LAMPUNG TENGAH



(Sumber: Monografis Desa Sendang Ayu Tahun 2018)

Aktifitas yang dilakukan masyarakat di desa Sendang Ayu mayoritas petani. Dalam kegiatan sehari-hari masyarakat melaksanakan kerjasama antara pemilik modal dan penggarap. Kebiasaan yang dilakukan masyarakat diantaranya tolong-menolong antara satu pihak dengan pihak kedua, untuk menambah penghasilan masyarakat.

Dalam melakukan kerjasama ini, yang terjadi di desa Sendang Ayu bisa mendapatkan keuntungan hasil yang banyak, karena bisa menghasilkan panen yang bagus. Namun demikian pasti ada kerugian adalah jika terjadi seperti daunnya mengalami kekriting, buah mengalami krepek (busuk), diserang serangga, dalam hal ini mengalami kerugian terjadinya hal ini. Maka hal ini yang di takutkan oleh para petani atau masyarakat terjadi kerugian yang sangat besar yaitu terjadinya krepek atau kriting. Di situlah terjadinya buah tidak sempurna, buahnya tidak lebat atau banyak. Biasanya yang terjadi di masyarakat krepek atau busuk ini tidak bisa di manfaatkan alias di buang begitu saja dan merusak buah atau pohon yang lainnya. Kerepek atau pun kriting daunnya ini masyarakat belum bisa mengatasi obat yang bisa mengatasi hama ini.

Setelah dilakukan penelitian (observasi) oleh penulis dapat diketahui di desa Sendang Ayu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah. Desa Sendang Ayu didirikan pada tahun 1950 dibawah pendatang dari Jawa Tengah yang pertama membuka desa tersebut.

Sejak pertama berdiri saat ini di desa Sendang Ayu banyak melakukan kerjasama antara pemilik modal dengan penggarap. Dalam segi bagi hasil di desa

tersebut sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang bisa saling menguntungkan keduanya.

Maka, pelaksanaan kerjasama ini yang bisa dilakukan oleh masyarakat di desa Sendang Ayu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, contohnya : pemilik modal mencari orang yang bisa mengelola tanah atau pun orang yang mempunyai ahli dalam bidang itu untuk menjalankan kerjasamanya. Jika seseorang yang mau untuk menjalankan dari penggarap untuk mau menjalankan kerjasama muzara'ah, harus ada kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak, untuk menjalankan dan bagi hasilnya sesuai kesepakatan waktu panen.

Menurut pendapat seorang salah satu warga desa tersebut, bahwa di desa Sendang Ayu masih melakukan kerjasama (muzara'ah) dalam masyarakat. Sebagaimana di ketahui oleh bapak Yamto, umur 30 tahun, Rt 19, Rw 08, selaku masyarakat berpendapat yang sering dilakukan kerjasama, dalam kerjasama ini, si penggarap mengelolah tanah dari awal sampai akhir dari egi pengolahan tanah samapai menanamnya. Penggarap merawat dari waktu menanam sampai sudah waktunya panen tanpa ikut campur pemodal. Pada saat panen si penggarap menyerahkan atau menyetorkan cabainya kepada si pemodal untuk di timbang, pada saat itu juga si pemberi modal atau pengepul tidak ngasih atau harga cabai saat itu juga, melainkan penyetoran berikutnya baru harga cabai yang lalu atau yang kemaren ngasih tau harganya.¹¹⁰

¹¹⁰ Yamto, *Wawancara*, Warga Tanggal 7 November 2018

Pada saat panen gagal kerugian yang di tanggung sendiri oleh si penggarap yang harus membayar utangnya selama satu musim itu, si pemilik modal tidak ikut menanggung waktu kerugian itu.

Sistem pembayaran kerjasama ini secara kes pada waktu totalan keseluruhan jumlah cabai waktu di setorkaan pada waktu panen dan di kurangi keperluan obat, mulsa dan lain-lain, baru tau si penggarap mendapatkan keuntungan ataupun kerugian yang di dapatkan selama satu musim.

Menurut keterangan bapak Pajiman dari selaku masyarakat atau petani yang kerjasama antara bos yang mempunyai modal menjalankan usaha ini. Dalam menjalankan usaha ini si penggarap meminta bahan-bahan seperti mulsa. Mulsa ini digunakan untuk menutup gulutan tanah yang sudah di bentuk seperti tanah yang di buat gulutan yang agak meninggi dan lebarnya 1 m. Drum tersebut di perlukan oleh petani untuk di gunakan untuk menggocor seperti (air di masukan kedalam drum samapai penuh lalu pupuk di campurkan jadi satu kedalam drum di aduk sampai merata sehingga iar itu berwarna kemerahan). Petani membutuhkan obat-obatan ini untuk mecegah atau mengatasi hama-hama. Petani memerlukan obat-obatan yang sering di gunakan untuk mencegah hama-hama antara lain (obat daun, obat pertumbugan, obat buah, obat ulat, belalang, jangkrik, bekecot, semut merah atau jamur).

Masyarakat menggunakan pupuk untuk menyuburkan tanah dan tanaman. Pupuk yang digunakan antara lain seperti (pupuk orea, organik dan mutiara). Pada saat penanaman petani mengurus tanamannya sendiri dari segi nanam, nyemprot dan lain-lain selama 3 bulan, awal panen masih buahnya masih sedikit yang

berwarna kemerahan masih nyutiri atau memilih buahnya yang warna kemerahan. Dan minggu berikutnya dalam waktu panen itu bisa mencapai 2-3 karung yang beratnya mencapai 55-65 kilo, pada waktu penyeteran sampai waktu panen habis. Penggarap menanam cabai 1/5 hektar mencapai 6 kuintal cabai, harganya cabai ditentukan di akhir waktu berikutnya waktu penyeteran, harga $20.000 \times 600 = \text{Rp. } 12.000.000$. Jumlah keseluruhan dan di potong bahan-bahan yang di ambil selama menanam.¹¹¹

Menurut bapak Nugroho dalam hal kerugian yang di tunggung oleh satu pihak si penggarap, dan disini si pemilik modal tidak mau ikut campur atas kerugiannya. Si penggarap harus mengganti rugi apa saja bahan-bahan yang di ambilnya pada saat panen. Pada saat petani membayar hutang kepada pemilik modal, pemilik modal tidak ini mau menerima uang secara kes, melainkan menanam lagi pada musim berikutnya. Baru di total utangny keseluruhan dan di tambah musim berikutnya, dan dilihat si penggarap ini mendapatkan keuntungan baru di total keseluruhan baru utangny awal di tutup atau di lunasi.¹¹²

Menurut bapak Agus harga cabai ini belum jelas harganya karena pada saat penyeteran belum jelas harganya karena harga belum di kasih tau pada waktu transaksi tidak mengetahui harga itu naik atau tidaknya. Disini ada terjadinya saling merugikan salah satu pihak yang terutama si penggarap yang tidak mengetahui. Masyarakat disini masih berkerjasama dan tidak mengetahui ada

¹¹¹ Pajiman, Wawancara, Warga Tanggal 7 November 2018

¹¹² Nugroho, Wawancara, Warga Tanggal 7 November 2018

kecurangan itu melainkan di biyarin dan tidak mau cari solusinya pada waktu penyeteran.¹¹³

Menurut bapak Maryono sistem pembayaran ini di lakukan pada saat selesai panen ataupun ngrampet, baru bisa tau jumlah yang di dapatkan. Pada saat penyeteran si penggarap hanya mencatat beberapa kilo cabai yang di setorkan. Disini uang penggarap belum bisa di terima secara langsung.penggarap meminta uang kepada si pemodal untuk membayar upah kerja, tetapi si pemodal langsung memotong atau di kurangi seberapa besar si penggarap meminjamnya.¹¹⁴

Menurut bapak Priyono selaku penggarap biasanya petani pad waktu panen tidak semua panennannya itu di setorkan kepada si pemodal, si pnggarap menjual kepada orang lain tidak sepengetahuan si pmodal melainkan secara diam-diam karena bisa mendapatkan uang secara kes (tunai) untuk kebutuhan lainnya seperti menyedot (menyiram tanaman cabai), mengasih makan tukang pekerja, upah pekerja, bensin dan lain-lain. Kebutuhan ini si penggarap mengeluarkan dana sendiri tanpa meminta uang dari pemilik modal.¹¹⁵

Menurut ibu Lilik selaku pedagang yang mengetahui atau mendengar tentang harga di akhir ini sangat merugikan salah satu pihak adalah si penggarap. Karena apa bila harga diakhir tidak mengetahui jumlahnya dan berapa besar naik ataupun turun harga saat itu juga. Pada dasarnya harga cabai itu tidak bisa di prediksi karena entah harga itu turu atau tidaknya, dan harga ini bisa berbeda dengan harga eceran atau pedagang dengan pemilik modal (bos) yang mengambilnya. Karena harga si pemilik modal (bos) itu tidak langsung diketahui

¹¹³ Agus, *Wawancara*, Warga Tanggal 7 November 2018

¹¹⁴ Maryono, *Wawancara*, Warga Tanggal 7 November 2018

¹¹⁵ Priyono, *Wawancara*, Warga Tanggal 7 November 2018

berapa besarnya, disinilah ada kecurangan harga pasaran, di harga pasaran atau di ecer itu langsung atau harga saat ini naik atau turunnya bisa langsung tawar menawar kepada pihak penjual lainnya, dan si pemilik modal ini tidak mengasih tau harga ya dan selisihnya bisa mencapai 1.000 perkilo di eceran atau pedagang lainnya.¹¹⁶

Menurut bapak Muyik selaku petani yang sering menanam cabai pernah terjadinya kegagalan panen. Kegagalan panen ini terjadi karena banyak faktor penyebab dan tidak bisa terhindar lagi atau tidak bisa diduga-duga datengnya. Faktor penyebab kegagalan panen cabai itu faktor cuaca yang sangat berpengaruh, pengeruhnya adalah satu hari panas setelah itu besoknya hujan inilah yang terjadi penyebabnya penyakit langsung menyerang tanaman cabai, disinilah para petani harus waspada dan mengatasinya. Selanjutnya terjadi karena daunnya kriting inilah yang belum bisa para petani mengatasinya karena kriting disini sudah timbul pasti yang lainnya atau pohon pada ikut kriting atau menyeber, belum tau obat yang ampuh dalam mengatasi kriting ini disebabkan hama cabuk yang berwarna putih yang sangat kecil dan banyak. Selanjutnya krepek (busuk buah) ini paling sulit mengatasinya karena belum ada obat yang paling manjur dalam mngatasi hal ini, kebanyakan para petani mengeluh panen gagal, ini faktor paling penting yang harus di basmi. Keseluruhan dari penyakit yang paling susah mengatasinya adalah krepek dan kriting. Belum begitu jelas apa penyebab buah itu krepek atau kriting, salah satu petani menanam cabai sudah terkena pennyakit

¹¹⁶Lilik, Wawancara, Pedagang Tanggal 7 November 2018

krepek dan kriting pasti semuanya para petani yang lainnya tertular dan semua para petani akan gagal panen atau panennya anjlok.¹¹⁷

Menurut bapak Mulyadi selaku tokoh masyarakat yang pernah menjalankan kerjasama tanaman cabai, sistem yang dijalankan di masyarakat di desa Sendang Ayu adalah sistem kemitraan. Sistem kemitraan dulunya itu bukan dari tanaman cabai tetapi melainkan dari tanaman sawit dari pemerintahan yang di berikan pada masyarakat untuk di kelola. Setipa masyarakat yang mau kerjasama menanam sawit tinggal mengambil dari penampung atau bibitnya seberapa yang dibutuhkan. Pada saat itu perjanjiannya setiap penyeterannya masyarakat menyertorkan semua hasilnya, hutangnya dari bibit sawit di bayar waktu penyeteran, tinggal masyarakat mau mencicil atau tidaknya setiap penyeteran. Dari sini lah kemitraan ada sebutan kemitraan asalnya.¹¹⁸

Menurut bapak Susah biasanya masyarakat di Desa Sendang Ayu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah manggilnya sebutan mbah. Tujuan mbah Susah untuk membuat lapangan pekerjaan, membantu orang-orang yang menggangur dalam bidang petani untuk berkerjasama ini, dan ingin membantu masyarakat dalam petani yang tidak mempunyai modal dalam usaha, memberikan penghasilan tambahan.¹¹⁹

¹¹⁷ Muyik, *Wawancara*, Warga Tanggal 7 November 2018

¹¹⁸ Mulyadi, *Wawancara*, Warga Tanggal 7 Novenber 2018

¹¹⁹ Mbah Susah, *wawancara*, Menjalankan Kemitraan / Bos Tanggal 7 November 2018

BAB IV

ANALISIS

A. Pelaksanaan Praktek Bagi Hasil Tanaman Cabai di Desa Sendang Ayu

Muzara'ah artinya suatu usaha atau kerjasama untuk mengerjakan tanah, baik kebon, sawah maupun ladang dengan perjanjian yang telah di sepakati bersama antara pemilik tanah dan penggarap tanah, baik biaya (modal) dari bos, si petani atau penggarap hanya menjalankan usahanya hasilnya di hitung pada saat panen. Pemberian harga disini harus mencerminkan keadilan yang di berikan kepada si penggarap harus terbuka pada saat transaksi.

Kerjasama dalam hal ini hasil masyarakat lakukan tidak ada akad yang mengikat (akad tertulis), tetapi seakan-akan telah terjadi kesepakatan akad. Bentuk akad kebanyakan yang terjadi dilakukan secara lisan atas dasar suka sama suka, rela sama rela, ikhlas sama ikhlas dan saling percaya tidak terlalu formal. Dengan cara bos datang atau mencari orang yang mau berkerja sama, untuk mempromosikan bahwa bos ini bisa membantu semua modalnya kepada masyarakat untuk memancing agar masyarakat tertarik untuk untuk berkerjasama yang menggunakan akad lisan atau perantara orang lain tanpa menggunakan perjanjian tertulis.

Dalam firman Allah SWT bersabda:

Artinya: 'Apa bila kamu bermuamalah secara tunai dan waktu ynag telah di tentukan hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Islam menganjurkan akad kerjasama harus dilakukan secara tertulis dilakukan secara lisan agar

terhindar dari hal-hal yang bisa merugikan dalam satu kerjasama. (Al-Baqarah: 282)

Di dalam Islam telah diatur semua kegiatan manusia dalam melakukan kegiatan bermua'malah diantaranya ada pelaksanaan bagi hasil. Pembagian hasil atau keuntungan dalam kerjasama di bagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak tanpa ada pihak yang merasa dirugikan.

Pembagian hasil yang dilakukan masyarakat di desa Sendang Ayu dibagi menurut kebiasaan masyarakat atau kesepakatan dua belah pihak dengan presentasi pembagian 60-40 karena pupuk, obat-obatan, mulsa, bibit, dari pemilik modal atau (bos), untuk penggarap hanya menjalankannya seperti membuat gulutan, masang mulsa dan menyiram (nyedot) waktu menanam dan pada saat habis panen. Pada saat panen cabai itu tidak memuaskan atau yang kita sering dengar dengan istilah gagal panen oleh penggarap. Inilah yang membuat kerugian si penggarap untuk membayar hutangnya kepada si pemilik modal. Kegagalan panen tanaman cabai di Desa Sendang Ayu itu terjadi karena hama yang tidak bisa di basmi. Hama yang menjadi perusak tanaman cabai adalah ulat, kriting, ataupun krepek.

Pada saat panen biasanya masyarakat di desa Sendang Ayu si penggarap akan menyetorkan kepada pengepul atau (bos), yang akan mengambil penyetoran di suatu tempat yang sudah di tentukan, semua hasil panen akan di setorkan kepada bos. Pada saat masyarakat atau si penggarap menyetorkan hasil panen cabai, si pengepul ini tidak mengasih tau harga pada saat selesai penimbangan, masyarakat hanya mencatat berapa kilo yang di dapatkan

selama penyeteroran. Pada saat panen berikutnya bos ini mengasih tau harga cabai yang kemaren yang di setorkan, dan ini terjadi sampai selesai satu musim cabai, hal ini terjadi karena tidak adanya sikap transparan pemilik modal dengan si penggarap. Hal inilah yang dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak dan menguntungkan salah satu pihak.

Dalam kondisi masyarakat di desa Sendang Ayu masih kurang pengetahuan dalam segi keIslaman karena ada hal yang menjanggal tidak mau berhenti dalam berkerjasama ini karena mencuranggi salah satu pihak, dan harus melihat dari segi Agama Islam baru tau boleh atau tidaknya dan harus menilai baik atau tidaknya, tetapi selama ini ada kecurangan ini masih tetap saja masyarakat menjalankan kerjasama ini samapai detik ini.

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Kemitraan Bagi Hasil Tanaman Cabai

Dalam kehidupan sehari-hari manusi menjalankan aktivitas seperti biasanya menjalankan ibadah, kerjasama, tolong-menolong sesama masyarakat inilah dalam kehidupan yang harmonis dan tentram. Begitu pula dengan menjalankan kegiatan bermuamalah hendak berdasarkan tata cara yang baik karena mencari ridho Allah SWT.

Syariat Islam menganjurkan kepada manusia agar menjalankan segala aktivitas berdasarkan aturan yang telah di tentukan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Begitupun dalam menjalankan kegiatan bermuamalah hendak berdasarkan tata cara yang baik dan di rindhai oleh Allah SWT.

Kerjasama dalam pertanian dan perkebunan di kenal dengan muzara'ah ini di bolehkan karena ada saling tolong-menolong antara individu yang satu dan yang lain.

Allah SWT berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ

ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: 'Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (Q.S Al-Maidah ayat 2)

Dalam Al-Quran diatas dapat kita pahami manusia di dalam masyarakat hidup di dunia ini tidak bisa sendiri tanpa bantuan orang lain. masyarakat beraktivitas sehari-hari itu memerlukan orang lain untuk membantu sesama individu yang satu dengan individu yang lain dari segi kebutuhan, dari segi untuk mengerjakan kebun atau pertanian dan untuk menggarap kebun yang tidak di kelola dari pada di biarin tidak di manfaatin.

Kerjasama bagi hasil merupakan kerjasama yang di lakukan antara kedua orang atau lebih dalam melakukan pekerjaan dimana hasil akan dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan bersama, yang memiliki nilai keadilan antara keduanya. Karena keadilan yang harusnya menjadi dasar utama dalam kehidupan sehari-hari untuk menonjolkan rasa jujur kepada orang lain atau hubungan timbal balik saat melakukan kerjasama ini.

Semua yang disebut di atas merupakan sistem pengolahan yang sederhana yang membentuk kerjasama antara pemilik tanah kepada penggarap yang di dasari dasar kepedulian persahabatan dan saling bantu antara kedua belah pihak. Merupakan perjanjian secara persaudaraan antara dua rekan, seorang yang memberikan tanahnya dan yang lebih penting modal, sementara lainnya memberikan tenaga-tenaganya.

Islam dengan tegas melarang kebohongan dan penipuan dalam bentuk apa pun. Nilai kebenaran ini memberikan pengaruh pada pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak berdusta, menipu melakukan kecurangan.



Artinya: “Kami adalah pemilik tanah yang terluas dari kalangan Anshar, maka kami mengadakan kerjasama dalam penggarapannya, dengan catatan si penggarap ini atau itu (hasil dari sini dari situ), akan tetapi barang kali yang ini menghasilkan sedangkan yang itu tidak. Oleh karena itu, kami dilarang melakukannya”. (H.R. Mutafaq alaih)

Dalam hadist ini melarang menggarap di dua lahan karena salah satu tempat tidak menghasilkan dan satu tempat menghasilkan karena ada salah satu tempat yang tidak di urus dengan baik dari sini ada yang merasa di rugikan maka dari hadist di atas melarangnya .

أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرَ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرَجًا مَحْلُومًا

Artinya: “Salah seorang di antara kamu adalah lebih baik untuk memberi garapan (muzara’ah) kepada saudara dari pada ia mengambil pajak tertentu atasnya”. (H.R. Bukhari)

Dari hadist di atas dapat kita jelaskan, bahwa seseorang yang mempunyai lahan yang tidak dikelola atau dibiarkan lahan itu, maka dari situ hadist ini menyarankan tanah ini untuk dimanfaatkan tanahnya kepada orang lain untuk di garap atau dikelola.

Allah SWT berfirman:

Artinya: “Barang siapa yang memiliki tanah, penggarapnya harus melakukan sendiri dan menyerahkan secara sukarela kepada seseorang sesama muslim untuk di garap atau jika dia menolak untuk melakukan kedua hal tersebut, maka tanahnya itu harus tetap di penggarapnya sendiri.

Pada zaman sekarang sistem bagi hasil dapat berjalan dengan baik pemilik tanah maupun petani penggarap akan mendapatkan bagian dari hasil tanahnya tersebut dan pembagiannya tersebut sesuai memperoleh hasil panennya. Jika tidak ada hasil, maka petani tidak mesti memberikan hasil cabainya kepada pengepul atau (bos) dan akan di jual kepada orang lain untuk masuk kantong sendiri hasil penjualan tersebut.

Namun demikian si penulis observasi dilakukan kerjasama ini pada tahunnya kadang terjadi gagal panen maupun mendapatkan hasil cukup lumayan. Disini petani penggarap sangat berkerja keras dan sungguh-sungguh untuk memajukan atau untuk mendapatkan hasil yang maksimal tanaman cabai pada setiap musim.

Berdasarkan masalah yang diatas yang ada dilapangan yang berdasarkan tentang *muzara'ah* dengan dasar hukum Al-Quran dan Hadist dapat diartikan atau dipaparkan dalam sistem bagi hasil atau kerjasama yang dilakukan masyarakat di desa Sendang Ayu tidak sesuai dengan ketentuan oleh hukum Islam.

Tetapi kerjasama disini harus ada keterbukaan antara pemilik modal dan si penggarap biar tidak ada saling dirugikan. Inilah harus ada perubahan sistem cara pengelolaan dari segi hal penjualan, mengasih harga dan obat-obatan yang lainnya.

Menurut saya dalam kerjasama *muzara'ah* di bolehkan karena adanya saling tolong-menolong sesama individu yang satu dengan individu yang lainnya. Tetapi yang disini tidak di bolehkan karena tidak ada suatu harga yang tidak beritahulan secara langsung inilah yang bisa disebut tidak ada kepastian harga. Kerjasama ini harus ada keterbukaan semua modal dan si penggarap yang sesuai Syariat Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan rumusan masalah diatas akad yang terjadi di masyarakat sudah terlalu lama di desa Sendang Ayu adalah akad kebiasaan yang sudah berlangsung lama, akad ini harusnya diperbaiki dengan cara musyawarah dengan keterbukaan si pemilik modal dengan si penggarap. Kedua belah pihak disini tidak ada yang merasa dirugikan.

Dalam kondisi masyarakat di desa Sendang Ayu masih kurang pengetahuan dalam segi keIslaman karena ada hal yang menjanggal tidak mau berhenti dalam berkerjasama karena mencuranggi salah satu pihak, dan harus melihat dari segi Agama Islam baru tau boleh atau tidaknya dan harus menilai baik atau tidaknya, tetapi selama ini ada kecurangan ini masih tetap saja masyarakat menjalankan kerjasama ini samapai detik ini.

Tetapi kerjasama disini harus ada keterbukaan antara pemilik modal dan si penggarap tidak ada yang saling dirugikan. Hal ini harus ada perubahan sistem cara pengolahan dari segi hal penjualan, mengasih tau harga cabai secara langsung dan mengasih harga obat-obatan persatunya dan lain-lain.

2. Syariat Islam menganjurkan kepada manusia untuk menjalankan aktivitas yang sesuai perintah Allah SWT dan Rasulnya. Begitu pula dalam

melaksanakan suatu acara bermuamalah hendak berdasarkan suatu tata cara yang baik dan benar yang sesuai syariat Islam.

Dari data lapangan yang berdasarkan tentang dasar hukum Al-Quran dan Hadist dapat diartikan atau dipaparkan dalam sistem bagi hasil yang dilakukan masyarakat di desa Sendang Ayu tidak sesuai dengan ketentuan oleh Hukum Islam.

Jadi pelaksanaan kerjasama muzara'ah di bolehkan karena adanya rasa saling tolong-menolong sama individu yang satu dengan individu yang lainnya. Tetapi yang disini yang tidak bolehkan karena adanya suatu harga yang tidak di beritahukan secara langsung inilah yang bisa merugikan salah satu pihak yaitu penggarap. Kerjasama ini harus ada keterbukaan sesama pemodal dan penggarap yang sesuai syariat Islam.

B. Saran

Saran yang sesuai dengan pembahasan yang diatas penulis dapat menyimpulkan:

1. Harus ada keterbukaan antara si pemilik modal dengan di penggarap atas penjualan.
2. Harus ada rasa kejujuran antara kedua belah pihak.
3. Menunjukan rasa kepedulian antara pemilik modal dengan si penggarap, dan rasa kepedulian ini menjadi amal ibadah.
4. Kerjasama ini harus sesuai Syariat Islam, yang tidak ada yang saling di rugikan antara keduanya maupun salah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir dan muhammad, *Hukum Dan Peneliti Hukum*, (Bandung: Mitra Aditya Bakti, 2004), h, 91.
- Abdullah al-Mushlih & Shawi- ash Shalah , *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004)
- Abdul RahmIan Ghazaly , *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: CV, Amzah, 1992)
- Al-Fauzan Saleh , *Fiqh Sehari-Hari* di Terjemah oleh Abdul Hamyyik Al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2005)
- Anwar Syamsul , *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010)
- Antonio Syafi'I Muhammad, *Bank Syari'ah*, (Jakarta: Gema Isnani, 2005)
- Arikunto Suharsismi , *Prosedur peneliti Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998)
- As Susiadi , *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung : Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014)
- A-Shiddeqy Hasbi Muhammad Tengku, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998)
- Bukhari Shahih, *Terjemahan Hadist*, (Jakarta: PT. Bumirestu, 1992)
- Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011)
- Djamil Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Djuwaini Dimyauddin , *Pengantar Fiqh Muamalat*, (Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010)

- El-Jazari Jabir bakar Abu, *Pola Hidup Muslim*, (Bandung: PT Remaja Rosdakanya, 1991)
- Fathurrahman Djami, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)
- Haroen Nasrun, *Usul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Publishin House, 1996)
- Hasan Ali. M , *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (fiqh Muamalah), (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003)
- Haroen Nasrun , *fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- Hadi Sutrisno, *Etodologi Research I*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1980
- Helmi karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997)
- Hidayat Enang , *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2016)
- Huda Qamarul , *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011)
- Irsyid Ahmad Karim Abdul Muhammad, *Al-Syamil Fi Muamalat wa Amalyyat Al-Masharif Al-Islamiyyah*, (Yodarnia: Dar An-Nafais, 2007)
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012)
- Mardani, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012)
- Mana Abudul, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri, 2004)
- Muslich Wardi Ahmad, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi, 1013)
- Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014)
- Moleong Lexy J , *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001)
- Muhammad Kadir Abdul, *Hukum dan Peneliti Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004)
- Pasaribu Chairuman, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994)
- Qardawi Yusuf Muhammad Syeh, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Jakarta: Bina Ilmu, 2001)

- Rahman Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995)
- Rachmawati Nuraini Eka, Abu Mumin bin Ghani. “*Akad Penerbit Sukuk di Pasar Modal Indonesia Dalam Perspektif Fiqih*”. Vol 14, No 1 (2017): Al-Adalah.
Ejurnal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/2203/2384. 14 Mei 2019
- Rahman Afzalur , *Doktrin Ekonomi Islam*, terjamah Soeroso, Nastangin, Jilid 2 (Yogyakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995)
- Ridwansyah, *Mengenal Istilah-Istilah dalam Perbankan Syari'ah*, (Bandar Lampung: Augrah Utama Raharja, 2012)
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016)
- Sabiq Sayyid , *Fikih Sunnah*, Jilid 4, (Bandung: PT Alma' Arif, 1996)
- Sayyid, Sabbiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), cet. Ke-1
- Shiddieqy Ash Hasbi Muhammad Tengku , *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet Ke-4, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001)
- Shihab Quraish.M, *Tafsir Al-Misbah*, Volume 12, (Jakarta: Letara Hati, 2010)
- Sholahudin Muhammad , *Kamus Istilah Ekonomi Keuangan dan Bisnis Syariah*, (Jakarta: Gremedia Pusat Utama, 2011)
- Sholihin Ifham Ahmad, *Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung : Alfabeta, 2016)
- Suhend Hendi , *Fiqh Muamalah* , (Jakarta: Rajawali Pres, 2014)
- Suhendi Hendi , *Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)
- Sunarto Zulkifli, *Transaksi Perbank syariah*, (Jakarta: Zikrul Hahim, 2003)
- Syafe'i Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001)
- Syafe'i Rachmat , *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010)
- Sula Syakir Muhammad, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gema Isnani Press, 2004)

Syafi'I Muhammad, Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Kepraktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)

Yazid bin Muhammad Abdilah Abin, *Sunan Ibnu Majjah*, Jus 3

